

**PERAN LSM DALAM PENGUATAN CIVIL SOCIETY
(Studi Terhadap LSM USC-Satunama Yogyakarta)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial

Oleh :

ANTON WIJAYA

NIM : 00540101

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA

FAKULTAS USHULUDDIN

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2006

NOTA DINAS PEMBIMBING

Yogyakarta, 20 Maret 2006

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi bahasa maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Anton Wijaya
NIM : 00540101
Jurusan- Prodi : Sosiologi Agama
Judul Skripsi : PERAN LSM DALAM PENGUATAN CIVIL
SOCIETY. (Studi Terhadap LSM USC-Satunama
Yogyakarta)

maka selaku Pembimbing / Pembantu Pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunaqosyahkan.

Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing,



M. Soehadha, S.sos, M.Hum
NIP. 150291739

Pembantu Pembimbing,



Ahmad Muttaqin, M.Ag, M.A
NIP. 150291985

HALAMAN PERSEMBAHAN

**Kupersembahkan Kepada yang Terhormat dan Tercinta :
Bapak-ku H. Yadi Hartono, Ibu-ku Masyiyah,
Mas-ku dan Mbak-ku,
Shbti Dwi Istriyani.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. آمين

Alhamdulillah, karena keadilan dan kecintaan Allah skripsi ini dapat tersusun.

Sungguh penulis tidak mempunyai pretensi atas skripsi ini selain cintanya kepada Allah 'Azza wa Jalla dan lautan Ilmu-Nya, serta baktinya kepada orang tua juga hormatnya kepada Mas-masku dan Mbak-mbakku, Dosen-dosenku, dan Guru-guruku.

Adapun skripsi yang penulis beri judul: "Peran LSM Dalam Penguatan Civil Society (Studi Terhadap LSM USC-Satunama Yogyakarta)" tidak lain merupakan perpaduan antara intervensi dari "luar" (realitas), pancaran nurani dan kemampuan akal diri penulis. Ide itu diperoleh atas pencarian penulis yang berangkat dari "ketidakpercayaan" terhadap Civil-society, bahwa ia mesti identik dengan kerakyatan, membawa indenpendensi rakyat, serta merupakan sebuah kemajuan dalam sistem negara.

Dan tentu saja pembahasan skripsi ini sangat jauh dari lebih sempurna, karena itu dengan tersusunnya skripsi ini semakin kian terbuka dengan kritik dan sarannya, dan semakin memahami titik kebodohnya.

Bagaimanapun juga, semua itu adalah jasa banyak pihak. Sebagai ekspresi *ta'dhim*, Penulis haturkan *Jazakumullah Ahsanal Jaza'*, kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Jurusan Program Studi Sosiologi Agama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Semua Dosen dan Karyawan Fakultas Ushuluddin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak M.Soehadha, S.Sos, M.Hum dan Bapak Ahmad Muttaqin, M.Ag, M.A selaku Pembimbing Skripsi.
6. Lembaga USC-Satunama Yogyakarta
7. Bapak Yadi Hartono dan Ibuku Masiyah, Mas-mas dan Mbak-mbakku.
8. Shbti Dwi Istriyani yang memberikan motivasi lahiriyah dan bathiyah.
9. Sdr Bondan Waluyo, S.Sos yang memberikan kiat dan memotivasi.
10. Segenap Guru-guruku, kawan-kawan dan keadaan yang mendewasakanku.

Akhirnya, Skripsi ini sekecil apapun harapan Penulis bisa menjadi amal sholeh yang bermanfaat dan penuh makna bagi khazanah ilmu dan peradaban, semoga. Amin.

Yogyakarta, 18 Maret 2006
Penulis,

Anton Wijaya



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Diskursus tentang *civil-society* berkembang tidak hanya secara teoritik yang menjelaskan realitas masyarakat, tapi menjadi suatu *ideal type* yang diharapkan dapat terwujud.

Sebagai organisasi *civil-society*, USC-Satunama mempunyai misi untuk berjuang juga demi berkembangnya potensi lokal dan nilai-nilai universal melalui kemitraan antar rakyat pada tingkat lokal, regional dan internasional dengan cara-cara tanpa kekerasan.

Atas dasar di atas, penulis melihat ada beberapa masalah yang dirumuskan di dalam dua pertanyaan, yaitu *pertama*: tentang bagaimana paradigma gerakan USC-Satunama sebagai lembaga swadaya masyarakat di Indonesia dalam penguatan *civil-society*; dan *kedua* tentang bagaimana aktualisasi peran dari paradigma di atas terhadap aktivitas peran pemberdayaan terhadap masyarakat yang diterapkan oleh USC-Satunama dalam penguatan *civil society*.

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif (*qualitative research*) dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pemilihan pendekatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan pengetahuan yang mendalam mengenai fenomena USC-Satunama sebagai suatu organisasi *civil-society* dalam memerankan aksinya sebagai kekuatan pengimbang, lembaga perantara, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka untuk menguatkan *civil-society* di tengah perubahan yang terjadi di Indonesia.

Pertama, atas dasar kerangka paradigma LSM yang dikemukakan oleh Mansoer Fakih, USC-Satunama lebih dominan berperan dengan menggunakan paradigma transformasi. Paradigma ini berpengaruh pada pilihan USC-Satunama menjadi lembaga pemberdayaan masyarakat. Berarti pula, berpengaruh pada peran penguatan *civil-society* yang dimainkan USC-Satunama, yaitu lebih dominan pada peran pengimbang (*countervailing power*) terhadap negara dan juga pasar (kalangan industri).

Kedua, USC-Satunama mengaktualisasikan perannya dalam penguatan *civil-society* dengan bentuk peran berikut ini:

1. *Peran Pemberdayaan*. Peran ini dilakukan oleh USC-Satunama supaya masyarakat sadar akan hak-haknya, mempunyai independensi, keswadayaan dan solidaritas, sehingga mempunyai kekuatan memperjuangkan hak-haknya.

2. *Peran Pengimbangan*. Peran USC-Satunama di sini dalam upaya mengembalikan kedaulatan atau hak-hak rakyat dalam mengelola sumber daya kehidupan secara adil dan berkelanjutan.

3. *Peran perantara*. Peran ini dimaksudkan untuk menggalang sinergi kekuatan *civil-society*, untuk memudahkan pencapaian tujuan dan misi USC-Satunama, yang dilakukan dengan memediasi aliansi atau koalisi kelompok-kelompok *civil-society*, memfasilitasi penyaluran aspirasi masyarakat, dan partisipasi dalam perubahan kebijakan negara dengan cara koalisi, aliansi, fasilitasi, dan *lobby*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Penulisan	26
BAB II : GAMBARAN UMUM USC-SATUNAMA DALAM LINGKUP LSM	
A. Gambaran Umum USC-Satunama.....	29
B. Visi dan Misi Organisasi USC-Satunama.....	31
C. Struktur Organisasi USC-Satunama	32
D. Keanggotaan dan Wilayah Kerja USC-Satunama.....	34
E. Sumber Dana USC-Satunama	35
F. Program-Program USC-Satunama	35
G. USC-Satunama Sebagai LSM	41

BAB III	: <i>CIVIL-SOCIETY</i> DAN PERAN LSM USC-SATUNAMA	
A.	Dinamika Penguatan <i>Civil-society</i> di Indonesia	54
B.	<i>Civil Society</i> sebagai Sikap Keberagamaan.....	66
C.	Peran USC-Satunama dalam Penguatan <i>Civil-society</i>	72
D.	Kekuatan & Kelemahan USC-Satunama dalam Penguatan <i>Civil-society</i>	107
BAB IV	: PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	111
B.	Saran-saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
RIWAYAT HIDUP PENULIS		



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Dewasa ini, *civil-society* menjadi wacana penting dalam diskursus sosial dan politik di Indonesia. Hal ini seiring dengan menguatnya arus demokratisasi di belahan dunia ketiga umumnya, dan di Indonesia khususnya, wacana *civil-society* sendiri diharapkan sebagai entitas yang mampu mengimbangi peran negara (*state*) dalam pengelolaan politik, sosial, dan ekonomi, sebagai suatu proses penting demokratisasi. Kerena itu, penguatan dan pemberdayaan *civil-society* diharapkan terus berkembang.

Konsep *civil-society* sebenarnya berasal dari proses sejarah masyarakat Barat. Namun demikian, perkembangan konsep *civil-society* ini mengalami signifikansi dan penguatan kontekstualisasi ketika arus demokratisasi atau lebih jauh lagi harapan akan terwujudnya suatu masyarakat yang berdaulat, demokratis dan berkeadilan menjadi *mainstream* dalam proses kehidupan bernegara khususnya di Indonesia. Diskursus tentang *civil-society* berkembang tidak hanya secara teoritik yang menjelaskan realitas masyarakat, tapi menjadi suatu *ideal type* yang diharapkan dapat terwujud. Karena itu, diskursus *civil-society* kemudian diiringi dengan bentuk-bentuk gerakan sosial sebagai bentuk praksis untuk mewujudkannya.

Civil-society sebenarnya merupakan konsep yang mengundang banyak penafsiran. Namun paling tidak, dapat ditangkap nilai spirit yang sama yang

terkandung dalam *term* tersebut. *Civil-society* adalah suatu ruang (*realm*) partisipasi masyarakat melalui perkumpulan-perkumpulan sukarela (*voluntary association*), media massa, perkumpulan profesi, serikat buruh, tani, dan perkumpulan keagamaan. *Civil-society* adalah gambaran dari keswadayaan, partisipasi masyarakat, kemandirian, bahkan sumber bagi gerakan transformatif, disamping kepatuhan kepada norma dan hukum, toleransi dan pluralisme.¹ Elemen penting dalam kaitannya dengan wacana *civil-society* (bahkan di tingkat aksinya) adalah keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).²

Dalam perkembangannya, pengertian *civil-society* makin didekatkan kepada LSM yang diidentifikasi sebagai ‘pilar kebangkitan masyarakat’. Meskipun sebenarnya, di awal kemunculannya, *civil-society* lebih dekat kepada masyarakat borjuis atau masyarakat ekonomi atas dan dibentuk oleh masyarakat borjuis.³ Karena itu, kemudian LSM menjadi elemen penting dalam transformasi *civil-society*. Menurut Dawam Rahardjo, menguatnya peranan negara dan sektor swasta di Indonesia menimbulkan reaksi, yaitu timbulnya LSM-LSM. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh John Kenneth Galbraith, sebagaimana dikutip oleh

¹ M. Dawam Rahardjo, *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*, Jakarta: LP3ES dan LSAF, 1999, hlm. 142.

² Sebagai suatu lembaga atau organisasi yang baru muncul di awal-awal Orde Baru, LSM secara umum mempunyai misi penguatan pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat marginal, di hadapan kekuasaan negara dan sektor swasta, dimana hal terakhir ini adalah isu yang berkaitan dengan erat dengan wacana *civil-society*.

³ *Civil-society* disebut sebagai “kesatuan kolektif yang mewujud secara mandiri dari negara” (*collective entity existing independently from the state*), bahkan secara kuat berhadapan dengan dan mampu mengendalikan negara. Logika ini merupakan logikanya dunia usaha, yang berkembang dan menjadi kekuatan politik tersendiri, bahkan bisa menjadi lebih kuat dari negara. Dampak dari kondisi seperti ini adalah munculnya marginalisasi individu, membentuk masyarakat secara kolektif dan melahirkan kekuatan ketiga yang independen, baik dari kekuatan negara yang pada dasarnya adalah kekuatan politik maupun dunia bisnis yang pada hakikatnya adalah kekuatan ekonomi. Lihat juga, M. Dawam Rahardjo, *Masyarakat Madani*, hlm. 166-167.

Dawam, dimana dalam masyarakat kapitalis muncul apa yang disebut kekuatan pengimbang (*countervailing power*), seperti lembaga konsumen yang mengontrol perilaku dan pengaruh produsen, himpunan buruh yang mengimbangi kekuasaan kelas pemilik dan kelas manajer, kelompok dan organisasi petani yang melawan pedagang dan kaum industri, dan juga organisasi *voluntir* yang mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan golongan lemah

Dalam kaitannya dengan pembangunan *civil-society*, LSM memainkan peran yang sebenarnya cukup signifikan (dilihat dari peran yang diembannya). Sebagai salah satu komponen dari *civil-society*, peran tersebut terlihat pada usaha yang dilakukan kalangan LSM untuk membangkitkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat. Membangkitkan kesadaran dan melakukan advokasi akan hak-hak fundamental masyarakat. Mengangkat isu-isu yang sering diabaikan, seperti: ekologi, perempuan, anak jalanan, sektor informal, dan HAM. Serta mencoba mencari alternatif dalam penyelesaian problematika sosial. Secara substantif, problematika sosial yang menjadi *concern* LSM tersebut meliputi: kemiskinan, kebodohan, pengangguran, ketidakadilan, kerusakan lingkungan, sampai alienasi dan marginalisasi kelompok-kelompok tertentu masyarakat. Karena itu, sebagai bagian dari organisasi *civil-society*, LSM sebenarnya adalah kelompok kepentingan yang mandiri dari negara, dan dikategorikan sebagai gerakan sosial baru (*new social movement*).⁴

⁴ Kastorius Sinaga, *NGO's in Indonesia*, (Saarbrucken, 1995), hlm. 26.

Sementara itu USC-Satunama telah menyelenggarakan berbagai pelatihan seperti CEFIL (*Civic Education for Future Indonesian Leaders*), CEFRUL (*Civic Education for Rural Leaders*), PCEP for East Timor (*Popular Civic Education Program*), PBETY (*Peace Building for East Timorese Youths*), STRECEW (*Strengthening Civic Education through Women Empowerment*), dan beberapa yang akan datang, dengan tema utama *civil society*. Pelatihan-pelatihan tersebut, bagaimanapun memang berdasarkan pada asumsi-asumsi bahwa rakyat Indonesia dewasa ini memerlukan penguatan *civil society*, lebih dari sekedar survai atau penelitian. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat sipil ini masih terus dikonfirmasi oleh adanya opini-opini dari komunitas yang berlainan, sehingga aktivitas itu dapat dikembangkan dalam cara yang bervariasi dengan intensitas yang lebih besar.

Setelah reformasi pada tahun 1998, keadaan menjadi jauh berubah. demokratisasi sedang menapak di Indonesia. Meskipun banyak yang menilai, hal itu masih sebatas demokrasi formal, prosedural dan minimalis, atau meminjam istilah Larry Diamond, sebagaimana dikutip oleh Syamsudin Haris, masih sebatas *electoral democracy*.⁵ Kekuasaan tidak lagi tunggal di tangan eksekutif. Legislatif yang selama Orde Baru berada di bawah hegemoni eksekutif, kini sudah mulai berani. Pemerintahan tidak lagi terpusat di Jakarta (sentralistik). Dengan otonomi daerah, kemudian dilakukanlah desentralisasi dan dekonsentrasi pemerintahan.

Secara umum, meskipun reformasi telah membawa dampak perubahan di sektor politik, namun perbaikan-perbaikan di bidang ekonomi dan sosial masih

⁵ Syamsudin Haris, *Konflik Elit Sipil*, dalam Maruto MD dan Anwari WMK (ed.), "Reformasi", 2002, hlm. 8.

belum mendapatkan titik terang. Karena itu, sebenarnya bagi kalangan LSM, hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri, khususnya apabila dikaitkan dengan misi utama mereka, yaitu penguatan dan pemberdayaan *civil-society*. Dimana, di samping tetap memperjuangkan terwujudnya sistem politik yang demokratis dan berkeadilan melalui kontrol terhadap lembaga-lembaga negara dan partisipasi masyarakat dalam proses-proses politik, juga menguatkan nilai-nilai *civil-society* berupa kesediaan dan keasadaran masyarakat untuk hidup toleran di tengah pluralitasnya dan penghormatan terhadap norma dan hukum.

Negara berubah, masyarakat berubah, seharusnya LSM pun berubah untuk menyikapi dan mengantisipasi perubahan yang ada, agar LSM dapat tetap berperan secara signifikan dalam perubahan-perubahan tersebut. Dan, USC-Satunama sebagai salah satu komponen gerakan *civil-society*, tentu dirinya mempersiapkan untuk menghadapi perubahan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Atas dasar permasalahan tersebut di atas, penulis melihat ada beberapa masalah yang dirumuskan di dalam dua pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana paradigma gerakan USC-Satunama sebagai lembaga swadaya masyarakat di Indonesia dalam penguatan *civil-society*?
2. Bagaimana aktualisasi peran dari paradigma di atas terhadap aktivitas peran pemberdayaan terhadap masyarakat serta sikap keberagaman yang diterapkan oleh USC-Satunama dalam penguatan *civil-society*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran deskriptif-analitis tentang visi USC-Satunama dan perannya sebagai kekuatan pengimbang, lembaga perantara, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penguatan *civil-society* di Indonesia berkaitan dengan perubahan-perubahan sosial dan politik yang terjadi pasca reformasi. Dengan mengidentifikasi dan menganalisis pilihan-pilihan paradigma, orientasi, strategi, metode dan program USC-Satunama dalam menyikapi perubahan-perubahan tersebut, juga (penulis) akan menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat bagi aktualisasi peran-peran tersebut.

Sedangkan signifikansi penelitian ini, secara teoritik diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam perumusan kerangka teori dan kerangka aksi gerakan organisasi *civil-society* dalam perannya menguatkan *civil-society* di Indonesia. Sementara secara parktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada USC-Satunama khususnya dan gerakan LSM umumnya tentang peran yang harus dilakukan dalam menyikapi perubahan-perubahan yang (senantiasa) terjadi dan berubah-ubah.

D. Tinjauan Pustaka

Dari berbagai khasanah wacana, *civil-society* dipahami sebagai kekuatan-kekuatan di luar kekuasaan atau pemerintah. Pertama, menurut Gramsci, *civil-society* meliputi kelompok-kelompok swasta yang dapat terdiri dari lembaga

keagamaan, serikat perdagangan, partai politik, asosiasi budaya, dan sebagainya, yang berbeda dari proses produksi dan aparat Negara. Semua organisasi yang dapat membentuk *civil-society* merupakan hasil dari jaringan kerja dan praktek hubungan sosial yang bersifat kompleks.

Kedua, Djiwandono memahami bahwa *civil-society* merupakan tuntutan untuk kembali pada suatu taraf kehidupan sosial yang ditandai oleh perserikatan bebas, dimana keputusan dibuat secara lokal, dan tanpa dikontrol oleh negara ataupun birokrasi. Dalam hal ini asas subsidiaritas menjadi dasar kemandirian dan otonomi perserikatan bebas itu.⁶ Tetapi lebih luas dari itu, *civil society* dimengerti juga sebagai bagian dari perjuangan terus-menerus bagi kebebasan dalam dunia modern. Konsekuensi dari kedua definisi ini, kondisi *civil- society* ditunjukkan oleh perilaku aktor yang menghormati hak asasi manusia, yang akuntabel, transparan, dan inklusif.⁷ Melembaganya pranata sosial yang mampu mewadahi konsep *civil-society* tersebut adalah Lembaga Swadaya Masyarakat, lembaga sosial keagamaan, dan juga kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*).

Sementara P.Hardono Hadi, PhD dalam penelitiannya yang didukung oleh USC-Safunama, memetakan bahwa LSM mempunyai kontribusi terbesar dalam aspek kelembagaannya dibanding dengan organisasi *civil-society* yang lain yaitu

⁶ J. Soedjati Djiwandono, *Umat Katolik dan Masyarakat Madani*, paper dipresentasikan dalam seminar-UAJY, September 2000.

⁷ Nico Shuttel Nordholt, *More Than Just Watchdog, Reflection on the Role Indonesian NGOs Coult Play to Enhance Their Civil Society*, The Twelfth INFID Conference paper, INFID, Denpasar, 1999.

Kelompok Swadaya Masyarakat atau CBO (*Comunity Based Organization*) dan Kelompok Profesional atau CG (*Civic Group*). Di dalamnya LSM mempunyai komposisi sumber daya insani yang kapabel dan kritis, cakupan bidang kegiatan yang luas, dan luasnya jaringan kemitraan yang merupakan bebcrapa unsur yang diperlukan pada kinerja LSM dalam melaksanakan kegiatannya.⁸

E. Kerangka Teori

Konsep *civil-society* memiliki akar sejarah yang kuat dalam peradaban masyarakat Barat. Namun, konsep tersebut terlupakan dalam diskursus ilmu sosial modern dengan jangka waktu yang cukup lama. Adalah gelombang reformasi yang melanda Eropa Timur dan Tengah di pertengahan tahun 80-an dan awal 90-an, yang memunculkan kembali wacana *civil-society* sebagai dasar dan arah perjuangan.⁹ Selanjutnya, konsep ini menjadi bahan perbincangan dan kajian di tingkat teoritik, dan menjadi rujukan gerakan di tingkat praksis di banyak belahan dunia, termasuk Indonesia.

Konsep *civil-society*, merupakan konsep yang mengandung banyak problem interpretasi dalam perkembangan sejarahnya. Hal ini bukan saja karena teori mengenai hal tersebut mengalami perkembangan dan perubahan, namun juga karena konteks dimana teori-teori tersebut dikembangkan juga mengalami perkembangan. Namun, agar penggunaan konsep tersebut dapat

⁸ P.Hardono Hadi, *Kebutuhan Civil Society bagi Masyarakat Indonesia*, dalam "Laporan Penelitian", Yogyakarta, 2000, hlm. 44.

⁹ Micheal W. Foley dan Bob Edwards, *Beyond Tocqueville: Civil-society and Social Capital in Comparative Perspective*, dalam "*Social Capital I*", Perpustakaan FISIP UI, hlm. 1.

dikontekstualisasikan, maka harus ada kerangka teori yang nantinya penulis gunakan sebagai landasan dan pisau analisa. Adapun kerangka teori tersebut, secara garis besar dapat diklasifikasikan sebagai berikut:¹⁰

Pertama, civil-society sebagai sistem kenegaraan muncul lebih awal. Bahkan, orang dapat melacaknya sampai ke zaman Yunani. Aristoteles menyebutkannya dengan *koinonia politike*, yaitu sebuah kelompok, asosiasi, atau komunitas politik dimana warga atau anggotanya (*citizens*) terlibat langsung dalam pengambilan keputusan.¹¹ Cicero menamakannya dengan *societas civilis*, selanjutnya, Thomas Aquinas mengembangkannya dengan memadukan konsep tersebut dengan masalah kekuasaan (*sovereign*) untuk mengembangkan kerajaan, kota, dan bentuk korporasi lainnya sebagai kesatuan yang terorganisasi yang disebutnya dengan *societas civilis res publica*.¹²

Kemudian Hobbes dan John Locke menyamakan *civil-society* dengan negara. Hobbes berpendapat bahwa masyarakat memerlukan suatu entitas baru, yaitu *civil-society* atau negara itu, yang dapat meredam konflik sehingga warga

¹⁰ Lihat, Asrori S. Karni, *Civil-society dan Ummat: Sintesa Diskursif Rumah Demokrasi*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 21-31; dan lihat juga Muhammad AS. Hikam, "Civil-society dan Masyarakat Indonesia", dalam Rustam Ibrahim (ed.), *Strategi*, 1999, hlm. 123-141.

¹¹ Jean L. Cohen dan Adrew Arato, *Civil-society and Political Theory*, London: MIT Press, 1992, hlm. 84; dan lihat juga Adi Suryadi Culla, *Masyarakat Madani, Pemikiran, Teori, dan Relevansinya dengan Cita-cita Reformasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 47-48.

¹² John Kean, *Despotism and Democracy: The Origins and Development of the Distinction Between Civil-society and the State 1750-1850*, dalam John Keane (ed.), "Civil-society and Political Theory New European Perspectives", (New York: Verso, 1998), hlm. 35.

masyarakat tidak saling menghancurkan. Atau, menurut Locke, agar kebebasan dan hak milik masyarakat terlindungi.¹³

Kedua, civil-society dimaknai sebagai visi etis dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dilakukan oleh Adam Ferguson, seorang filsuf Skotlandia, sebagai antisipasi terhadap perubahan sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri dan munculnya kapitalisme. Dimana keduanya ini mengakibatkan lunturnya tanggung jawab sosial masyarakat dan menguatnya pemenuhan kepentingan pribadi. *Civil-society* diharapkan dapat memelihara tanggung jawab sosial yang akan menghalangi munculnya despotisme. Karena, dalam *civil-society*, solidaritas sosial muncul dengan didasari oleh sentimen moral dan sikap saling menyayangi. *Civil-society* dipahami sebagai lawan dari masyarakat primitif atau masyarakat Barbar.¹⁴

Ketiga, civil-society sebagai sebuah elemen ideologi kelas dominan. Hegel mulai memisahkan *civil-society*, atau disebutnya dengan *buergerliche gesellschaft* dari negara. Lembaga negara tersusun dari elemen-elemen keluarga, korporasi atau asosiasi, dan aparat administrasi atau legal. Dalam susunan tersebut, *civil-society* adalah lembaga sosial yang berada di antara keluarga dan negara (administrasi), yang dipergunakan oleh warga sebagai ruang untuk mencapai pemuasan kepentingan individu dan kelompok. Namun *civil-society* masih belum mampu mengontrol dan mengatasi konflik internal. *Civil-society* cenderung

¹³ Muhammad A. S. Hikam, *Civil-society dan Masyarakat Indonesia*, dalam Rustam Ibrahim (ed.), "Strategi", 1999, hlm. 128-129.

¹⁴ Ernest Gellner, *Membangun Masyarakat Sipil: Prasyarat Menuju Kebebasan*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 68-90.

melumpuhkan dirinya sendiri (*a self crippling entity*). Karena itu, *civil-society* membutuhkan negara, sebagai identitas penjelmaan ide universal, untuk melindungi negara berada di atas *civil-society*.¹⁵

Konsepsi Hegel yang bersifat sosiologis dipergunakan juga oleh Karl Marx, kendatipun dengan pemahaman yang sangat berbeda. Sambil tetap mempertahankan konsep *civil-society* sebagai *buergerliche gessellschaft*, Marx mereduksinya dalam konteks hubungan produksi kapitalis, sehingga *civil-society* adalah kelas borjuis itu sendiri. Akibatnya, berbeda dengan Hegel, Marx menganggap *civil-society* sebagai kendala bagi pembebasan manusia dari penindasan. Hapusnya *civil-society* (*the withering away of civil-society*) merupakan tahapan yang harus ada untuk munculnya masyarakat tak berkelas.¹⁶

Pandangan Marx yang cenderung ekonomistik dan deterministik (baca: materialistik) terhadap *civil-society* tidak diikuti oleh semua pemikir Marxist. Gramsci misalnya, mencoba menggunakan cara pandang lain, yaitu dengan menempatkan *civil-society* bukan sebagai elemen basis material, tetapi sebagai superstruktural (ideologi). *Civil-society* dalam pandangan Gramsci adalah arena bagi penggelaran hegemoni di luar negara yang disebutnya sebagai *political society*. Melalui *civil-society* itulah aparat hegemoni beroperasi mengembangkan hegemoni untuk menciptakan konsensus dalam masyarakat. Menurut Hikam, *civil-society* dalam pengertian Gramsci merupakan momen “moral” dari kekuatan

¹⁵ Neera Chardoke, *Benturan Negara dan Masyarakat Sipil*, Yogyakarta: Istawa, 2001, hlm. 174; dan lihat juga Muhammad A. S. Hikam, “*Civil-society* dan Masyarakat Indonesia”, dalam Rustam Ibrahim (ed.), “Strategi”, hlm. 129.

¹⁶ Muhammad A. S. Hikam, *Civil-society dan Masyarakat Indonesia*, dalam Rustam Ibrahim (ed.), “Strategi”, hlm. 130.

dominan, sementara negara (*political society*) merupakan momen politis-etis-nya. Gramsci memberikan penafsiran terhadap *civil-society* dari sisi ideologis (superstruktur), berbeda dengan Marx yang melihatnya dari relasi produksi (basis material). Karena itu, konsep Gramsci sebenarnya lebih dinamis, karena dalam momen hegemoni tersebut selalu terbuka kemungkinan *counter* hegemoni dari kekuatan di luar negara. Gramsci menyebut adanya “kesadaran berlawanan” (*contradictory consciousness*) dalam setiap momen hegemoni yang membuka peluang bagi perlawanan atasnya. Dari proses ini.¹⁷

Keempat, *civil-society* sebagai ke pada akhirnya akan melahirkan masyarakat teratur (*regulated society*)kuatan pengimbang dari negara. Pemaknaan peran ini oleh Alexis de Tocqueville.¹⁸ Menurutnya, posisi *civil-society* ini tidak apriori sebagai subordinasi dari negara. *Civil-society* dalam dirinya memiliki kekuatan politis yang dapat mengekang atau mengontrol kekuatan intervensionis negara. Dalam konteks ini, *civil-society* dapat dipahami sebagai wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dengan ciri-ciri kesukarelaan, keswasembadaan, keswadayaan, dan kemandirian berhadapan dengan negara. Demikian ini merupakan sumber legitimasi keberadaan negara, walaupun tidak sepenuhnya negara mengontrol yang terakhir. Karena, bagaimanapun juga negara mempunyai kapasitas yang berbeda dan lebih bersifat inklusif.

¹⁷ Norberto Bobbio, *Gramsci and the Concept of Civil-society*, dalam John Keane (ed.), “*Civil-society and Political Theory New European Perspectives*”, (New York: Verso, 1998), hlm. 95; lihat juga Muhammad A. S. Hikam, “*Civil-society dan Masyarakat Indonesia*”, dalam Rustam Ibrahim (ed.), “*Strategi*”, hlm. 130-133.

¹⁸ Alexis de Tocqueville, *Democracy in America*, vol. 2, (New York: Alfred A. Knopf, 1994), hlm. 115-125.

Sementara itu, Tocqueville juga menekankan adanya dimensi kultural yang membuat *civil-society* bisa bertindak sebagai kekuatan penyeimbang, yaitu keterkaitan dan semangat kepatuhan terhadap norma-norma dan nilai hukum yang dianut oleh warganya. Dengan properti kultur yang menjunjung tinggi independensi, liberasi, dan kesetaraan derajat di muka hukum inilah *civil-society* di Amerika Serikat kemudian menjadi referensi dan model bagi kemampuan masyarakat dalam menegakkan sistem politik demokrasi. Di Amerika Serikat, *civil-society* menjadi fasilitator bagi organisasi politik dan sebaliknya organisasi politik memperkuat *civil-society* dan membuatnya tetap berorientasi pada kepentingan publik.

Dengan demikian, Toqueville tidaklah berpikir bahwa hubungan antara politik dan *civil-society* sebagai sesuatu yang asing karena saling membutuhkan. Dengan kata lain, hubungan antara keduanya bersifat resiprokal, karena pada hakikatnya *civil-society* merupakan sumber masukan bagi proses-proses politik, dan politiklah yang mengkonstruksi *civil-society* tidak hanya berorientasi kepada kepentingan sendiri akan tetapi sensitif terhadap kepentingan publik juga.

Konsep Tocquevill dan Gramsci, menurut Muhammad A. S. Hikam, menjadi referensi utama para aktivis dan ahli dalam diskursus *civil-society* kontemporer. Selain itu, diperkaya oleh berbagai pemikiran kritis teoritis, seperti Hannah Arendt dan Jurgen Habermas yang memberi kontribusi pemikiran mengenai ruang publik bebas (*free public sphere*) dan kewarganegaraan (*citizenship*). Charles Taylor dan Daniel Bell menegaskan bahwa pluralisme dan

peran komunitas-komunitas kecil yang tumbuh dalam perkembangan *civil-society* di Amerika.¹⁹

Di Indonesia, dikatakan oleh Nurcholish Madjid bahwa *civil-society* diterjemahkan sebagai “masyarakat madani” yang dieksplorasi dari pengalaman masyarakat Madinah pada masa Islam awal di zaman Nabi Muhammad Saw. Dalam konteks kenabian itu, *civil-society* dipahami sebagai suatu masyarakat yang dipenuhi dengan nilai-nilai keadaban (*civility*), dengan ciri-ciri: egalitarianisme, penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi, keterbukaan partisipasi seluruh anggota masyarakat secara aktif, kepatuhan terhadap norma dan hukum, toleransi, pluralisme, musyawarah, serta penegakan hukum dan keadilan (*law empowerment and justice*).²⁰

Selain Nurcholish, Paulus Wirutomo juga mengembangkan konsep *civil-society* sebagai masyarakat adab, yang dipahami sebagai tidak hanya memberikan posisi warga negara yang lebih mandiri terhadap negara, bukan hanya demokrasi yang hanya menekankan hak-hak individual dan supremasi hukum, akan tetapi terutama menekankan pada pembenahan moral hubungan antar warga negara itu sendiri, nilai-nilai kerukunan yang menghasilkan kepedulian terhadap semua warga dan nasib seluruh bangsa (sikap komunitarian).²¹

¹⁹ Muhammad A. S. Hikam, *Civil-society dan Masyarakat Indonesia*, dalam Rustam Ibrahim (ed.), “Strategi”, hlm. 133.

²⁰ Nurcholish Madjid, *Menuju Masyarakat Madani*, dalam “Jurnal *Ulumul Qur'an*”, no. 2/VII, Jakarta, 1996, hlm. 51-55.

²¹ Paulus Wirutomo, *Membangun Masyarakat Adab: Suatu Sumbangan Sosiologi*, (Jakarta: FISIP Universitas Indonesia, 2001), hlm. 19-20.

Dengan pemahaman pemikiran itu, *civil-society* menghargai kebebasan individu, akan tetapi menolak anarkhi, memperjuangkan kebebasan berekspresi tetapi juga menuntut tanggung jawab etik, menolak intervensi negara tetapi memerlukan negara sebagai pelindung dan penengah konflik, baik internal maupun eksternal. Sebabnya, negara memang tidak langsung dilihat sebagai lawan karena negara juga mempunyai elemen yang signifikan bagi pertumbuhan *civil-society*, seperti pranata hukum.²² Karenanya, *civil-society* mempunyai kandungan visi etis yang berkepentingan memelihara kohesi sosial dan menghindari jebakan titik ekstrem. Keterjebakan pada titik ekstrem tertentu, misalnya kebebasan tanpa batas, justru dapat menciptakan anarkhisme dan *chaos*.²³

Menurut Micheal W. Foley dan Bon Edwards, *civil-society* dianalisis dalam dua versi, yaitu *civil-society* dalam pengertian yang menekankan kemampuan, baik untuk mengembangkan nilai-nilai keadaban (*civility*) bagi kelompok-kelompok maupun dalam kehidupan warga negara, bahkan untuk masyarakat secara umum. Ini merupakan pengertian *civil-society* yang pertama. Kedua, *civil-society* diartikan sebagai suatu ruang bagi tindakan yang independen dari negara dan yang mampu melakukan perlawanan terhadap rezim yang tirani.²⁴

²² Muhammad A. S. Hikam, *Demokrasi dan Civil-society*, (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. 87.

²³ Asrori S. Karni, *Civil-society dan Ummat: Sintesa Diskursif Rumah Demokrasi*, hlm. 36.

²⁴ Mischeal W. Foley dan Bob Edwards, *The Paradox of Civil-society*, *Journal Democracy*, 7.3, dalam [http: "Journal of Democracy"](http://Journal of Democracy). hlm.l.

Adapun pengertian *civil-society* yang pertama di Indonesia, lebih menekankan aspek horizontal dan kultural, serta berkaitan erat dengan keadaban (*civility*), kekerabatan (*fraternity*), dan kesetaraan (*equality*). Sedangkan *civil-society* dalam pengertian yang kedua, memfokuskan pada aspek vertikal dengan mengutamakan otonomi masyarakat terhadap negara dan berkaitan erat dengan aspek politik, dimana *civil* dipahami dekat dengan kewarganegaraan (*citizen*) dan kebebasan (*liberty*).²⁵

Sebagai kerangka teori, pemikiran-pemikiran kritis di atas dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori. *Pertama*, dalam pengertian kelompok disebut dengan *civil-society organization* pertama, yaitu kelompok-kelompok dalam masyarakat yang berada di wilayah kultural atau memperjuangkan nilai-nilai kultural dan tindakannya dilakukan secara horizontal. Seperti, organisasi massa (ormas), organisasi sosial, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), KSM, dan asosiasi profesional.

Kedua, dalam pengertian yang disebut *civil-society organization* kedua, yaitu kelompok-kelompok dalam masyarakat yang memperjuangkan nilai-nilai yang berdimensi politik dan tindakannya dilakukan secara vertikal. Misalnya, partai politik (parpol) oposisi, LSM advokasi, kelompok penekan, gerakan buruh, kelompok kepentingan. Walaupun, tidak semua atau tidak selamanya kelompok ini memperjuangkan nilai kelompok sendiri, seperti kelompok kepentingan.

Dua kategori *civil-society* tersebut mempunyai karakteristik masing-masing dalam memegang nilai-nilai (*values*) yang dipraktikkan. *Pertama*, nilai

²⁵ Iwan Gardono Sudjatmiko, *Wacana Civil-society di Indonesia*, dalam "Jurnal Sosiologi Masyarakat", hlm. 38-42.

civil-society pertama, yaitu nilai-nilai dalam masyarakat secara umum ataupun dalam kelompok-kelompok *civil-society* secara khusus yang berdimensi kultural. Seperti, toleransi, egalitarianisme, solidaritas, kemandirian, serta kepatuhan masyarakat pada norma dan hukum. *Kedua*, nilai *civil-society value* kedua, yaitu nilai-nilai dalam masyarakat secara umum maupun dalam kelompok-kelompok *civil-society* secara khusus yang berdimensi politik. Misalnya, independensi, liberasi, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik, dan supremasi hukum.

Semula *civil-society* tersebut sebagai “kekuatan kolektif yang mewujudkan secara mandiri dari negara” (*collective entity existing independently from the state*). Yang berdiri mandiri bahkan secara kuat berhadapan dengan dan mampu mengendalikan negara itu adalah dunia usaha. Tetapi, dunia usaha telah berkembang menjadi kekuatan politik tersendiri. Bahkan, dunia usaha dapat menjadi lebih kuat dari negara. Baik negara maupun dunia usaha sering berkembang menjadi demikian kuatnya, bahkan saling berkoalisi, yang dampaknya dapat menimbulkan marginalisasi individu dan masyarakat secara kolektif. Karena itu, timbul kekuatan ketiga yang independen, baik dari kekuatan negara yang pada dasarnya adalah kekuatan politik maupun dunia bisnis yang pada hakikatnya adalah kekuatan ekonomi.²⁶

Hal ini, seperti dijelaskan oleh John Kenneth Galbraith, dimana dalam masyarakat kapitalis muncul apa yang disebut sebagai kekuatan pengimbang (*countervailing power*), seperti lembaga konsumen yang mengontrol perilaku dan

²⁶ M. Dawam Rahardjo, *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*, hlm. 166-167.

pengaruh produsen, kelompok buruh yang mengimbangi kekuasaan kelas pemilik dan kelas manajer, kelompok dan organisasi-organisasi *voluntir* yang mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan golongan-golongan lemah atau marginal dalam masyarakat.²⁷

Sejak tahun 1970, LSM di Indonesia berkembang sangat pesat. Perkembangannya sangatlah mengesankan jika ditinjau dari segi jumlah, keragaman serta letak geografis. Jika di akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an hanya ada sedikit sekali gerakan sosial dan kelompok non-pemerintah yang secara aktif memiliki kepedulian dan kemampuan menangani masalah-masalah pembangunan, kini keadaan tersebut sudah jauh berubah. apalagi jika dilihat dari lokasi mereka, dari sedikit jumlah organisasi tersebut sebagian besar berkedudukan di Jakarta atau kota-kota besar di Jawa. Sebagian besar aktivis dalam LSM itu pada umumnya adalah mantan aktivis mahasiswa di kota besar yang mendapat akses cukup luas terhadap sumber dana.²⁸

Dalam waktu kurang dari tiga dasawarsa, terdapat lebih dari 3000 kelompok LSM dan organisasi semacam itu yang tersebar tidak saja di kota-kota besar di Jawa, melainkan juga telah meluas di berbagai daerah terpencil sampai di kawasan yang tidak mudah dijangkau, hampir di seluruh Indonesia. Jika dilihat bidang ataupun masalah yang menjadi kepedulian, atau yang ditangani, juga terjadi peningkatan yang luar biasa. Jika dulu hanya memusatkan perhatian kepada kebutuhan praktis dan pengembangan kelompok usaha bersama, sekarang

²⁷ *Ibid*, hlm. 68.

²⁸ Mansour Fakih, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996), hlm. 4.

masalah yang ditangani merentang luas mulai dari masalah lingkungan dan perlindungan hutan hujan (*rainforest*), masalah HAM dan masalah yang berkaitan dengan penindasan lainnya, masalah gender, masalah hak budaya dan hak pengetahuan masyarakat adat (*indigenous wisdom*), masalah eksploitasi buruh dan hak-hak berserikat bagi kaum buruh serta banyak masalah lainnya yang tidak muncul di tahun 1970-an.²⁹

Istilah lembaga swadaya masyarakat (LSM) sendiri muncul di Indonesia pada akhir tahun 1970-an, jadi bukan awal adanya kegiatan kemasyarakatan itu sendiri. Istilah ini merupakan pengganti dari istilah sebelumnya, yaitu organisasi non-pemerintah (Ornop), yang merupakan terjemahan langsung dari istilah *non government organization* (NGO).

Perubahan istilah ini dilakukan karena, di satu sisi ada kesan dan anggapan bahwa istilah Ornop memiliki konotasi negatif, yaitu seakan-akan sebagai lawan pemerintah, di pihak lain, di kalangan aktivisnya saat ini, ada kesadaran bahwa gerakan mereka ini dilandasi dengan satu misi positif, yaitu mengembangkan kemandirian dan membangun keswadayaan. Tidak semata-mata bukan pemerintah. Dengan alasan-alasan ini, tepatnya dalam satu lokakarya yang diadakan oleh Bina Desa, April 1976, di Ungaran, istilah LSM muncul menggantikan Ornop.³⁰

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Zaim Saidi, *Secangkir Kopi Max Havelaar: LSM dan Kebangkitan*, (Jakarta, Gramedia dan YLKI, 1995), hlm. 9.

LSM di Indonesia dapat dikategorikan sebagai organisasi sektor *non-profit*. Susannah Morris melakukan teoritisasi terhadap fenomena LSM dengan mencirikan organisasi sektor *non profit*, berikut ini:

1. Terorganisasi (*organized*), berarti terinstitusionalisasi dari sudut bentuk organisasi dan sistem operasionalnya.
2. Bukan negara (*private*), berarti secara institusional bukan bagian dari pemerintah atau negara.
3. Tidak berorientasi profit (*non-profit distributing*), berarti tidak berorientasi menghasilkan keuntungan bagi pemilik atau para direktornya, tapi mengembalikan pendapatannya untuk kepentingan misinya.
4. Swadaya (*self-governing*), berarti mempunyai sistem untuk mengatur dirinya sendiri.
5. Kesukarelaan (*voluntary*), berarti partisipasi sukarela dalam operasionalisasi atau manajemen organisasi.

Sedangkan, Eldridge mencatat bahwa LSM Indonesia memiliki ciri-ciri umum yang sama, antara lain: *pertama*, orientasi mereka kepada penguatan kelompok-kelompok komunitas sebagai basis dari masyarakat dan sebagai pengimbang bagi pemerintah. Hal ini berkaitan dengan satu pencarian kreatif bagi pola baru pembentukan kelompok untuk memenuhi perubahan sosial dan pembangkitan struktur dari yang tidak diuntungkan dan tidak berdaya. *Kedua*, pada umumnya ada komitmen yang kuat terhadap cita-cita partisipasi rakyat di dalam pengambilan keputusan. *Ketiga*, adanya satu komunitas LSM di Indonesia, dengan banyak hubungan silang antar pribadi dan kelembagaan, yang saling

mendukung, terdapat pertukaran gagasan dan sumberdaya, yang memberikan potensi pada satu front bersama pada berbagai tingkat.³¹

Mansour Fakih berpendapat bahwa ada tiga paradigma gerakan LSM, yaitu paradigma konformisme, reformasi, dan transformasi. Paradigma gerakan LSM konformisme dipahami dari aktivis LSM yang melakukan pekerjaan yang didasarkan pada paradigma bantuan karikatif. Motivasi utama bagi program dan aktivitas mereka adalah menolong rakyat dan didasarkan pada maksud untuk membantu mereka yang membutuhkan. Pertanyaan tentang kenapa ada begitu banyak rakyat miskin, dianggap bukan persoalan penting. Implementasi visi ini di lapangan mengikuti pendekatan yang dikembangkan oleh paradigma reformis, yaitu pengembangan masyarakat yang bersifat partisipatif. Tipe perubahan sosial yang dicapainya adalah fungsional.³²

Paradigma gerakan LSM reformis adalah pemikiran yang didasarkan pada ideologi modernisasi dan developmentalisme. Asumsinya adalah bahwa keterbelakangan mayoritas rakyat disebabkan oleh adanya suatu yang salah dengan mentalitas, perilaku, dan budaya rakyat, seperti tingkat kebutuhan berpretasi rakyat yang rendah dan nilai-nilai tradisional lainnya. Hal-hal tersebut menyebabkan lemahnya partisipasi dalam pembangunan. Sebab itu, tugas utama LSM dalam konteks ini adalah memfasilitasi masyarakat agar tumbuh independensi atau kewirausahaannya, dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan.

³¹ M. M. Billah, *Peranan Ornop dalam Proses Demokratisasi yang Berkedaulatan Rakyat*, dalam Rustam Ibrahim (ed.), "Agenda LSM Menyongsong Tahun 2000", (Jakarta: CESDA dan LP3ES, 1997), hlm. 196.

³² *Ibid*, hlm. 125-126.

Persoalan partisipasi dan swadaya menjadi isu utama dalam paradigma ini, di tingkat aksi, yang terpenting adalah berjuang mempengaruhi pemerintah sehingga pendekatan dan metodologi mereka akan dipakai dan diimplementasikan oleh pemerintah juga. Sedangkan, visi mengenai perubahan sosial sama dengan paradigma konformisme, yaitu perubahan struktural fungsional.

Sementara itu, paradigma gerakan LSM transformasi adalah gerakan transformasi yang melihat masalah rakyat dalam diskursus pembangunan dan struktur yang timpang dalam sistem yang ada. Perspektif ini mencoba mencari paradigma alternatif dari struktur dan superstruktur yang menindas rakyat, serta mendorong ke arah terciptanya struktur yang memungkinkan bagi rakyat untuk mewujudkan potensi kemanusiaannya. Mereka mencari struktur dan superstruktur yang memungkinkan bagi rakyat untuk mengontrol perubahan sosial bagi masyarakat menuju jalan demokratisasi dalam perubahan sosial, ekonomi, dan politik.

Pada ranah aksi, perspektif paradigma ini cenderung melihat program pembangunan masyarakat, seperti proyek peningkatan pendapatan, pelayanan kesehatan dan lain sebagainya, sebagai titik masuk untuk berbagai kegiatan jangka panjang seperti mengorganisasi masyarakat untuk perubahan. Pendidikan untuk memunculkan kesadaran kritis dipilih sebagai kegiatan utama bagi kegiatan jangka panjang. Tipe perubahan sosial yang menjadi visi paradigma ini adalah perubahan sosial yang bersifat kritikal dan struktural. Berdasarkan paradigma-paradigma tersebut, Mansoer menunjukkan bahwa mayoritas LSM berada dalam

paradigma reformis. Sedikit dalam perspektif transformatif, begitu juga dengan konformis.³³

Dari pemaparan di atas beberapa kata kunci berikut ini dapat membantu pengidentifikasian terhadap LSM di Indonesia, yaitu *pertama*, bersifat non pemerintah, LSM yang didirikan secara hukum tidak mempunyai kaitan dengan organisasi negara atau pemerintahan. *Kedua*, mempunyai asas kesukarelaan. *Ketiga*, tidak mencari keuntungan (*non-profit*). *Keempat*, tidak untuk melayani diri sendiri atau anggota-anggotanya. Dengan kata lain, LSM didirikan untuk melayani kepentingan umum (*public good*), kaum miskin, kaum *du'afa*, kaum tertindas, dan kaum terpinggirkan.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan adalah metode penelitian kualitatif (*qualitative research*) dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pemilihan pendekatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan pengetahuan yang mendalam mengenai fenomena USC-Satunama sebagai suatu organisasi *civil-society* dalam memerankan aksinya sebagai kekuatan pengimbang, lembaga perantara, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka untuk menguatkan *civil-society* di tengah perubahan yang terjadi di Indonesia pasca reformasi 1998. Penelitian deskriptif-analitis ini berusaha untuk memperoleh deskripsi secara mendalam, sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang berkaitan

³³ Mansour Fakih, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial*, .(Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996), hlm. 131-136.

dengan fenomena sosial yang diteliti, dan menganalisis setiap bagian dari fakta-fakta yang ada.

1. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi secara singkat dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian. Unsur-unsur yang tampak itu disebut data atau informasi yang harus diamati dan dicatat secara benar dan lengkap.³⁴

Penelitian ini menekankan metode kualitatif, yaitu dengan menggunakan metode observasi sebagai metode utama. Adakalanya observasi dilakukan *participan observation* yaitu peneliti ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subyek yang diteliti yaitu USC-Satunama, seolah-olah merupakan bagian dari mereka. Juga *non participant observation* yaitu peneliti berada di luar LSM USC-Satunama yang diamati dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan.³⁵

b. Interview atau wawancara.

Interview atau wawancara adalah pengumpulan data dengan jalan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara

³⁴ Hadari Nawawi, *Instrumen Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gadjadarda University, 1995), cet. V, hlm.74.

³⁵ Irawan Soehartono, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998), cet. II, hlm.70

(pengumpul data) kepada informan, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam (*tape recorder*).³⁶ Teknis ini digunakan untuk memperoleh informasi dari semua komponen LSM USC-Satunama baik para pelakunya maupun informannya. Interview ini lebih ditekankan dengan teknik FGD (Focussed Group Discustion) dilakukan dalam partisipasi diskusi yang diselenggarakan LSM USC-Satunama melalui seminar-seminar maupun pelatihan-pelatihan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah tehnik mengumpulkan data yang tidak langsung ditujukan kepada subyek penelitian.³⁷ Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi, tapi juga catatan, transkip, buku-buku, surat kabar, majalah, prestasi, notulen rapat dan sebagainya, yang berkaitan tentang LSM USC-Satunama sebagai obyek kajian.

2. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan penyederhanaan ke dalam bentuk yang lebih mudah difahami dan dapat diinterpretasikan yang nantinya dapat memudahkan penyusun dalam mengadakan penelitian. Setelah data terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan,

³⁶ *Ibid*, hlm.6.

³⁷ *Ibid*, hlm.70.

gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan frekuensi ada hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain di masyarakat.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang obyeknya adalah LSM USC-Satunama dan masyarakat dampingan atau segala sesuatu yang dipengaruhi. Obyek itu diteliti dalam kondisi sebagaimana adanya atau dalam keadaan atau secara naturalistik.³⁸ Maka metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan ciri-ciri:

- a. Bersifat deskriptif, yaitu data terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan matematis susunan angka.
- b. Mempunyai setting USC-Satunama dan masyarakat dampingan sebagai sumber data langsung.
- c. Lebih menekankan proses kerja dari seluruh kegiatan USC-Satunama yang dihadapi dan diterjemahkan dalam seluruh kegiatannya.
- d. Cenderung menggunakan pendekatan induktif.

e. Penelitian kualitatif memberi titik tekan pada makna yaitu fokus penelitian terpaut langsung dengan masalah kegiatan LSM USC-Satunama dan masyarakat dampingan.³⁹

³⁸ Hadari Nawawi, *Instrumen...*, *op.cit*, hlm.208.

³⁹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm.51.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam bagian pendahuluan, bab I diletakkan. Bab pertama ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bagian isi, ada tiga bab yang dibahas. Dua bab pertama bersifat deskriptif-analitik dan satu bab berikutnya bersifat kritik sosial. Kajian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu bab II yang memaparkan tentang USC-Satunama dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), yang meliputi sejarah dan perkembangan USC-Satunama, dan peranan LSM di Indonesia. Dari bab dua ini, diharapkan ada gambaran pengertian terminologis, pemahaman konseptual dan kerangka sosiologis dalam USC-Satunama yang seharusnya tercipta dalam realitas sosial.

Adapun bab yang bersifat kritik sosial sebagai bab inti ditempatkan pada bab III. Dalam bab ini, penulis menjelaskan tentang *civil-society* dan peranan USC-Satunama dalam penguatan *civil-society*. Bahasan tersebut mencakup konsep dan perkembangan *civil-society*: teori dan praksis, *civil-society* sebagai sikap keberagamaan, serta peranan USC-Satunama sebagai lembaga swadaya masyarakat, serta perubahan sosial yang dicapai oleh USC-Satunama.

Dalam bab tiga ini juga, diberikan ulasan sosiologis dan kajian kritis atas peranan USC-Satunama terhadap penguatan *civil-society*, yang meliputi strategi penguatan *civil-society*, program pemberdayaan masyarakat, kekuatan dan

kelemahan USC-Satunama yang mengandung peluang dan ancaman bagi USC-Satunama. Bab ini merupakan jantung pembahasan skripsi.

Dari analisis ini akan diambil sebuah kesimpulan dan saran-saran yang diperlukan di dalam bab IV. Bab lima ini diletakkan pada bagian penutup. Bab penutup ini merupakan bab yang terakhir dalam pembahasan skripsi ini. Sebagai bahan pendukung dan pelengkap dari penelitian ini akan disertakan daftar kepustakaan dan lampiran-lampiran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan USC-Satunama sebagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan penguatan *civil-society* sebagai peran USC-Satunama di dalam masyarakat, dalam bab penutup ini penulis dapat menyimpulkan berikut ini:

Pertama, atas dasar kerangka paradigma LSM yang dikemukakan oleh Mansoer Fakhri, USC-Satunama lebih dominan berperan dengan menggunakan paradigma transformasi, walaupun ada beberapa aspek yang bersifat reformatif sebagaimana tampak pada program, tipe kepemimpinan (*leadership*), tipe pelayanan dan asumsi terhadap perubahan sosial yang dicapai. Paradigma ini berpengaruh pada pilihan USC-Satunama menjadi lembaga pemberdayaan masyarakat. Berarti pula, berpengaruh pada peran penguatan *civil-society* yang dimainkan USC-Satunama, yaitu lebih dominan pada peran pengimbang (*countervailing power*) terhadap negara dan juga pasar (kalangan industri).

Meskipun demikian, USC-Satunama tetap melakukan peran pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) dan peran perantara (*intermediary*) walaupun tetap dalam kerangka pengimbangan. Karena, peran pemberdayaan melalui program penguatan organisasi rakyat, ditujukan supaya USC-Satunama mempunyai basis pemberdayaan yang kuat dan menjadikan USC-Satunama menjadi gerakan rakyat. Sedangkan, peran perantara yang

dilakukan melalui penggalangan kekuatan kelompok-kelompok *civil-society* ditujukan juga untuk memperkuat posisi tawar masyarakat di hadapan negara.

Kedua, USC-Satunama mengaktualisasikan perannya dalam penguatan *civil-society* yang dikonstruksi, berikut ini:

1. *Peran Pemberdayaan*. Peran ini dilakukan oleh USC-Satunama supaya masyarakat sadar akan hak-haknya, mempunyai independensi, keswadayaan dan solidaritas, sehingga mempunyai kekuatan memperjuangkan hak-haknya. Hal ini dilakukan dengan pendidikan dan pengorganisasian rakyat, dengan cara menyatu dengan masyarakat, menumbuhkan kesadaran, mengembangkan kapasitas dan kemandirian kelembagaan masyarakat.
2. *Peran Pengimbangan*. Peran USC-Satunama di sini dalam upaya mengembalikan kedaulatan atau hak-hak rakyat dalam mengelola sumber daya kehidupan secara adil dan berkelanjutan.
3. *Peran perantaraan*. Peran ini dimaksudkan untuk menggalang sinergi kekuatan *civil-society*, untuk memudahkan pencapaian tujuan dan misi USC-Satunama, yang dilakukan dengan memediasi aliansi atau koalisi kelompok-kelompok *civil-society*, memfasilitasi penyaluran aspirasi masyarakat, dan partisipasi dalam perubahan kebijakan negara dengan cara koalisi, aliansi, fasilitasi, dan *lobby*.

Ketiga, dalam hal pelaksanaan nilai-nilai sikap keberagamaan, USC-Satunama adalah sebagai pilar penegakan konsep ajaran agama melalui konsep *civil-society*. USC-Satunama berusaha mampu mensistemkan sikap ajaran keagamaan (toleransi, pluralisme, demokratis, dan keadilan) melalui berbagai

peran dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan makna toleransi menurut Azyumardi Azra yakni menunjukkan kesadaran masing-masing individu untuk menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lain yang berbeda. Begitu juga dengan penegakan konsep pluralisme seperti yang telah disampaikan oleh Nurcholish Majid yakni tidak hanya dengan sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan pluralisme itu sebagai bernilai positif, merupakan rahmat Tuhan selalu ditunjukkan oleh USC-Satunama dalam setiap peranannya dengan adanya program kerukunan antar umat beragama yakni program *Interfaith* (*Interfaith Cooperation in the Creation of Peace and Good Local Governance*) dan Program Pelatihan CEFREL (*Civic Education for Religious Leaders*).

B. Saran-saran

Adapun saran-saran dalam skripsi yang perlu ditindaklanjuti adalah bahwa penelitian ini tidak mengembangkan indikator-indikator untuk menilai kinerja *civil-society* terutama sebagai dampak dari apa yang telah dilakukan oleh USC-Satunama. Karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menilai hasil kinerja USC-Satunama khususnya dan LSM pada umumnya sebagai komponen penting *civil-society*.

Di samping itu, dari penelitian yang telah dilakukan ini, dengan segala keterbatasannya, ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh USC-Satunama sebagai obyek penelitian ini, yaitu *pertama* untuk menjadi gerakan

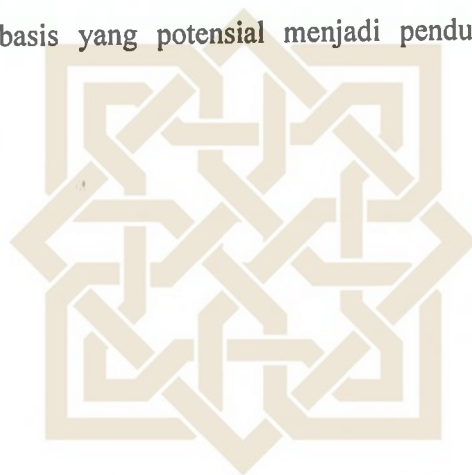
LSM transformatif, tampaknya USC-Satunama perlu lebih konsisten dengan paradigma dan mandat yang dipilih.

Kedua, dalam menyusun strategi pemberdayaan yang terformat secara baku sebagaimana yang menjadi otokritik kalangan USC-Satunama, bisa dilakukan dengan membuat paradigma USC-Satunama serta ideologi gerakan USC-Satunama sebagaimana yang sebenarnya telah tertuang dalam statunya yang menyangkut visi, misi, dan peran yang dimainkan berkaitan dengan pengembalian kedaulatan rakyat, perlawanan terhadap neo-liberalisme dan kapitalisme global, transformasi negara ke arah *good and clean governance* menjadi paradigma gerakan USC-Satunama yang di dalamnya tersusun kerangka strategi pemberdayaan USC-Satunama.

Selanjutnya, tugas ke depan adalah bagaimana menjadikan paradigma gerakan berupa struktur berpikir tersebut dapat ditransformasikan menjadi kesadaran para aktivis USC-Satunama, yang kemudian dimanifestasikan ke dalam kerja-kerja pemberdayaan USC-Satunama.

Ketiga, perlu adanya lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) yang melakukan pengkajian dan pengembangan model-model pendidikan dan pengorganisasian masyarakat, supaya dapat lebih efektif dan berhasil guna, terutama pada transformasi nilai-nilai *civil-socceity* terhadap masyarakat basis USC-Satunama. Untuk itu, anarkhisme yang masih sangat potensial muncul di masyarakat lapisan *grassroot* dapat diminimalisasi sedemikian rupa, karena anarkhisme adalah suatu yang kontra produktif bagi upaya USC-Satunama mengembalikan kedaulatan rakyat.

Keempat, dengan begitu keinginan untuk menjadi gerakan rakyat, tampaknya USC-Satunama perlu lebih serius lagi mensosialisasikan visi, misi, dan gerakannya kepada masyarakat, sehingga diharapkan dapat mereduksi persepsi negatif yang muncul di masyarakat. Walaupun demikian, masyarakat yang mempunyai persepsi negatif tersebut, harus dilihat juga sebagai masyarakat basis yang potensial menjadi pendukung bagi gerakan USC-Satunama.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

- Azra MA, Prof. Dr. Azyumardi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta Selatan: ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan The Asia Foundation. 2003.
- Baso, Ahmad, *Civil-Society Versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran "Civil-Society" dalam Islam Indonesia*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
- Billah, M. M., "Peranan Ornop dalam Proses Demokratisasi yang Berkedaulatan Rakyat", dalam Rustam Ibrahim (ed.), *Agenda LSM Menyongsong Tahun 2000*, Jakarta: CESDA dan LP3ES, 1997.
- Bobbio, Norberto, "Gramsci and the Concept of Civil-society", dalam John Keane (ed.), *Civil-society and Political Theory New European Perspectives*, New York: Verso, 1998.
- Chardoke, Neera, *Benturan Negara dan Masyarakat Sipil*, Yogyakarta: Istawa, 2001.
- Cohen, Jean L. dan Andrew Arato, *Civil-society and Political Theory*, London: MIT Press, 1992.
- Culla, Adi Suryadi, *Masyarakat Madani, Pemikiran, Teori, dan Relevansinya dengan Cita-cita Reformasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Djiwandono, J. Soedjati, "Umat Katolik dan Masyarakat Madani", paper dipresentasikan dalam seminar-UAJY, September 2000.
- Fakih, Mansour, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996.
- Foley, Micheal W. dan Bob Edwards, "Beyond Tocqueville: Civil-society and Social Capital in Comparative Perspective", dalam *Social Capital 1*, Perpustakaan FISIP UJ.
- _____, Micheal W. Foley dan Bob Edwards, "The Paradox of Civil-society", *Journal Democracy*, 7.3, dalam http://Journal_of_democracy.html.
- Gellner, Ernest, *Membangun Masyarakat Sipil: Prasyarat Menuju Kebebasan*, Bandung: Mizan, 1995.
- _____, "Political Arena Ghanie-Rachman, Meuthia, "Peran Organisasi Non-Pemerintahan dalam Reformasi Sosial", dalam Maruto MD dan

Anwari WMK (ed.), *Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat*, Jakarta: LP3ES, 2002.

Revisited: Civil-society Coalitions for Legislative Reform”, dalam Jurnal *Sosiologi Masyarakat*, no. 10, Labsosio, Universitas Indonesia, 2002.

Hadi, P.Hardono, “Kebutuhan Civil Society bagi Masyarakat Indonesia”, dalam Laporan Penelitian, Yogyakarta, 2000.

Haris, Syamsudin, “Konflik Elit Sipil”, dalam Maruto MD dan Anwari WMK (ed.), *Reformasi*, 2002.

Hefner, Robert, “A Muslim Civi Society?: Indonesian Reflections on the Conditions of Its Possibility”, dalam Robert Hefner (ed.), *History and Civility: The History and Cross-Cultural Possibility of a Modern Political Ideal*, New Brünswlek: Transaction Press, 1998.

Hikam, Muhammad A. S., *Islam, Demokrasi dan Pemberdayaan Civil-society*, Jakarta: Erlangga, 2000.

_____, *Demokrasi dan Civil-society*, Jakarta: LP3ES, 1996.

_____, “Civil-society dan Masyarakat Indonesia”, dalam Rustam Ibrahim (ed.), *Strategi*, 1999.

Karni, Asrori S., *Civil-society dan Ummat: Sintesa Diskursif Rumah Demokrasi*, Jakarta: Logos, 1999.

Kean, John, “Despotism and Democracy: The Origins and Development of the Distinction Between Civil-society and the State 1750-1850”, dalam John Keane (ed.), *Civil-society and Political Theory New European Perspectives*, New York: Verso, 1998.

Korten, David C., *Menuju Abad 21: Tindakan Sukarela dan Agenda Global*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.

_____, “Strategies of Development Oriented NGO’s: Four Generations”, dalam *People Centered Development Forum*, 21 Februari 1990.

Laporan Tahunan USC-Satunama 1 Mei 2001-30 April 2004.

Madjid, Nurcholish, “Menuju Masyarakat Madani”, dalam Jurnal *Uluml Qur’an*, no. 2/VII, Jakarta, 1996.

- Nordholt, Nico Shuttel, "More Than Just Watchdog, Reflection on the Role Indonesian NGOs Coult Play to Enhance Their Civil Society", The Twelfth INFID Conference paper, INFID, Denpasar, 1999.
- Prasetyo, Hendro, dkk., *Islam dan Civil-Society: Pandangan Muslim Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2002.
- Rahardjo, M. Dawam, *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*, Jakarta: LP3ES dan LSAF, 1999.
- Sanit, Arbi, "Demokrasi, Kekuatan Masyarakat, dan Strategi Alternatif", Maruto MD dan Anwari WMK (ed.), *Reformasi*, 2002.
- Saidi, Zaim, *Secangkir Kopi Max Havelaar: LSM dan Kebangkitan*, Jakarta, Gramedia dan YLKI, 1995.
- Sinaga, Kastorius, *NGO's in Indonesia*, Saarbrucken, 1995.
- Sudjatmiko, Iwan Gardono, "Wacana *Civil-society* di Indonesia", dalam *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, no. 9, Jakarta, 2001.
- Tocqueville, Alexis de, *Democracy in America*, vol. 2, New York: Alfred A. Knopf, 1994.
- Wirutomo, Paulus, *Membangun Masyarakat Adab: Suatu Sumbangan Sosiologi*, FISIP Universitas Indonesia, 2001.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SATUNAMA

Yayasan Kesatuan Pelayanan Kerja Sama *Unity Service Cooperation Foundation*

Alamat/Address: Jalan Sambisari No.99, Desa Duwet RT.06/34, Sendangadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta 55285, Daerah Istimewa Yogyakarta. **Telp.:** (0274) 869045, 868922; **Fax.:** (0274) 869044; **Email:** uscindo@yogya.wasantara.net.id. **Contact person:** Meth. Kusumahadi, DCM (Direktur). **Kantor Cabang/Branch office:** USCF/SATUNAMA Kotak Pos 43, Larantuka, Flores, NTT; Larantuka 86219; **Telp.:** (0383) 21792; **Fax.:** (0383) 2192

Latar belakang dan tujuan: Lembaga yang berdiri pada 25 Maret 1998 ini awalnya bernama USC Canada Indonesia Office yang kemudian beralih menjadi USC Foundation (Unity Service Cooperation Foundation), atau dalam bahasa Indonesia menjadi Yayasan Kesatuan Pelayanan Kerja Sama (SATUNAMA). Tujuan lembaga terutama mengabdikan diri kepada kepentingan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial ekonomi, pendidikan, serta kegiatan lainnya, untuk menjunjung tinggi nilai-nilai cinta kasih sesama manusia tanpa membedakan suku, agama dan ras.

Bidang dan bentuk kegiatan: Bidang kegiatan utama lembaga ini adalah pertanian, air bersih dan sanitasi, gender, usaha kecil dan perkoperasian, HAM, demokrasi, sektor informal, peternakan, kelautan dan perikanan, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, serta social justice, dengan good governance sebagai satu-satunya bidang kegiatan penunjang. Sedangkan bentuk kegiatan utamanya adalah pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan masyarakat, seminar, diskusi, lokakarya, serta perkreditan, yang ditunjang penerbitan dan publikasi, serta konsultasi pembangunan.

Program: Berbagai program yang dilaksanakan di antaranya: pemberdayaan masyarakat, program kemitraan bagi pembangunan, pelatihan, water supply and cattle breeding, water supply and food security, East-Timor rural development, popular community education, dana siaga menghadapi krisis ekonomi, peace building process, dan bantuan pelatihan.

Publikasi: Menerbitkan NGO dan Globalisasi serta buletin Gemma.

Sumber dana: Selain iuran dan sumbangan anggota, juga hibah dari lembaga-lembaga internasional (USC Canada, CIDA, Konrad Adenauer Stiftung, Canada Funds, dan Pemerintah Denmark), dan pendapatan dari jasa kerja sama dengan pihak lain serta pendapatan dari pelayanan organisasi.

Keanggotaan dan wilayah kerja: Satunama adalah anggota USC International di Ottawa, Kanada. Wilayah kerja lembaga adalah propinsi-propinsi Aceh, Sulawesi Selatan, NTT, NTB, Maluku, DI Yogyakarta, Papua, Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Staf: Lembaga ini memiliki 36 karyawan, 33 orang staf tetap dan 3 orang staf tidak tetap.

Background and purpose: Established on 25 March 1998, SATUNAMA was initially USC Canada Indonesia Office. Later, it was changed into USC Foundation (Unity Service Cooperation Foundation), which, in Bahasa Indonesia, is Yayasan Kesatuan Pelayanan Kerja Sama (SATUNAMA). It mainly aims to serve the interests of the society, by carrying out social, economic and educational activities, to promote the values of love for others regardless of their tribal, religious and racial backgrounds.

Area and form of activities: SATUNAMA's main fields of service are agriculture, clean water and sanitation, women in development, cooperatives, human rights, democracy, informal sector, marine development and fishery, and social justice. Those activities are all carried out in the forms of education and training, community development and facilitation, seminar, workshop, and credit provision.

Program: SATUNAMA has carried out, and is continuing to implement, programs including community empowerment, training, water supply and cattle breeding, and food security, East Timor rural development, popular community education, peace building process, and training assistance.

Publication: The foundation publishes reading materials entitled NGO and Globalization, and Gemma bulletin.

Funding sources: Membership dues and donations are the foundation's main source of fund, in addition to grants from international funding agencies like USC Canada, CIDA, Konrad Adenauer Stiftung, Canada Funds, and the Danish government.

Membership and working area: Presently, it is a member of USC International (Ottawa, Canada). Its area of operation covers provinces like Aceh, South Sulawesi, East Nusa Tenggara, West Nusa Tenggara, Maluku, Yogyakarta Special Territory, Papua, East Java and Central Java.

Staff: Presently SATUNAMA has 36 staff members, 33 full-time and 3 part-time.

Lembaga Pengembangan Masyarakat Yayasan Kesatuan Pelayanan Kerjasama (Satunama)

- Dir. Eksekutif** : Meth Kusumahadi
Penghubung : Meth Kusumahadi
Alamat : Jl. Sambu Sari 99, Desa Duwet RT 07/RW 3
Sendangadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta 55285
Telepon : (0274) 869045
Fax : (0274) 869044
E-mail : uscindo@yogya.wasantara.net.id
- Perwakilan** : Satunama Larantuka
Kotak Pos 43 Larantuka Nusa Tenggara Timur (NTT)
Telp./Fax. (0383) 21792
: 28 Maret 1998
- Berdiri**
Staf Ahli :
1. Meth Kusumahadi - Pengembangan Kelembagaan
 2. Hardono Hadi - Pendidikan Kewarganegaraan
 3. Purwuharsanto - Resolusi Konflik
 4. Frans Tugimin - Perencanaan Strategis
 5. Fajar Sudarwo - Penelitian Partisipatif
 6. Budi Susilo - Resolusi Konflik
 7. Eddy Hundyono - Pengembangan SDM
 8. Heny Sulistiowati - Pengembangan SDM
- Visi-Misi** :
- Untuk membantu meningkatkan pembangunan manusia seutuhnya melalui penggalangan kesetiakawanan social internasional dalam menghadapi tantangan mengentaskan kemiskinan.
 - Memperkuat kapasitas lembaga masyarakat untuk menghasilkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan social-ekonomi yang berwawasan keswadayaan, lingkungan dan gender
- Sifat Lembaga** : LSM
Sektor Kegiatan :
1. Pendidikan dan Pelatihan
 2. Pembangunan Institusi
 3. Kesehatan Masyarakat
 4. Kredit Mikro
 5. Konservasi Lingkungan
 6. Gender
 7. Penanggulangan Kemiskinan
- Pelayanan/Jasa** :
1. Konsultasi (Strategic Planning, Capacity Building, HRD, Organizational Development)
 2. Pelatihan (Civic Education for Future Indonesia Leaders, Civic Education for Rural Leader, Peace Building, Small-scale Business Development)
 3. Pendampingan Masyarakat
- Lokasi Kegiatan** : Seluruh Indonesia
Daerah Istimewa Yogyakarta
Nusa Tenggara Timur

Lampiran 3

Pengembangan Pertanian Organik

Latar Belakang

Penolakan terhadap revolusi-hijau yang muncul pada dekade 1970-an, kini menampakkan kebenarannya secara kasat mata. Meski agak terlambat, sejak 1990 USC secara intensif memberikan dukungan dan memfasilitasi pengembangan sistem pertanian organik melalui LSM lokal dan kelompok-kelompok tani. Mulai tahun 1991, bersama dengan seluruh anggota USC Internasional, USC mengkampanyekan penerapan sistem pertanian organik dengan semangat: "Benih untuk Kehidupan" (Seeds for Survival).

Tujuan

Promosi sistem pertanian organik ini diawali dengan pelatihan keanekaragaman-hayati (bio-diversity), sekolah lapang (field school study) dan bank benih (seed bank) disusul dengan pembuatan kompos dan pestisida organik, konservasi benih lokal serta dokumentasi berbagai kearifan lokal.

Realisasi

Penerimaan petani terhadap program ini dapat dikatakan relatif lambat. Tetapi dengan terus merosotnya harga beras unggul sejak 1995, diimbangi dengan meningkatnya biaya produksi, animo petani untuk kembali ke sistem pertanian organik akhir-akhir ini meningkat sangat tinggi. Dengan perkembangan baru ini, sejak Agustus 1996, fokus program USC-Satunama lebih diarahkan pada advokasi kebijakan dan kampanye penggunaan produk organik kepada masyarakat yang lebih luas. Pada Agustus 2000, bekerjasama dengan Universitas Sanata Dharma dan Hari Pangan Sedunia, USC- Satunama menyelenggarakan seminar internasional tentang Ketahanan Pangan, dilanjutkan dengan penerbitan buku: "Pangan, Kearifan Lokal & Keanekaragaman Hayati: Pertaruhan Bangsa yang Terlupakan."

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 4

Pelatihan

Menjelang akhir dekade 1980-an, USC-Satunama yang ketika itu masih disebut USC Canada Field Office, secara berkala telah menyelenggarakan pelatihan dalam bidang Pengembangan Masyarakat (Community Development) dan Penguatan Organisasi LSM (Organizational Development of NGO).

Pengalaman selama hampir satu dasawarsa melakukan kedua jenis pelatihan ini memberi kesadaran, bahwa persoalan kemiskinan, ternyata, tidak mungkin didekati secara parsial hanya dari sudut ekonomi, tetapi harus melibatkan rakyat dalam proses penentuan kebijakan.

Praktek dan mekanisme politik sepanjang tiga dekade terakhir, sebagaimana umum diketahui, telah mengikis habis kompetensi, kemampuan, maupun bakat kepemimpinan individu. Kondisi ini tumbuh subur di dalam format politik yang sangat otoriter. Kematian demokrasi dalam wacana kenegaraan ketika itu, lalu mendorong USC-Satunama untuk mencoba memberikan kontribusi dalam membangun masyarakat sipil yang kuat dengan kepemimpinan yang accountable di dalam format politik demokrasi. Gagasan ini coba diwujudkan secara konkrit melalui program pelatihan. Maka sejak pertengahan tahun 1996, USC-Satunama mengembangkan berbagai modul pelatihan dalam bingkai pendidikan kewargaan (civic education) pengembangan organisasi dan manajemen LSM dan pelatihan untuk membina perdamaian dalam keberagaman.

Asumsi yang mendasari pelatihan ini adalah, perubahan hanya mungkin dicapai dengan keterlibatan rakyat dalam proses politik dan meyakini bahwa keberagaman merupakan potensi untuk perkembangan masyarakat sipil yang kuat di dalam format politik demokratis.

Pelatihan-pelatihan yang hingga kini diselenggarakan oleh USC-Satunama secara rutin mencakup: Jenis Pelatihan Berdasarkan Kategori

1. Pendidikan Politik & Kepemimpinan
 1. CEFIL (Civic Education for Future Indonesia Leader)
 2. CEFRUL (Civic Education for Rural Leader)
 3. STRECEW (Strengthening Civic Education through Woman Organization)
 4. PCE (Popular Civic Education)
 5. CELOP (Civis Education for Local Politicians)
 6. PELATIHAN PENDIDIKAN KEWARGAAN BAGI PARA PEMIMPIN RELIGIUS (CEFREL)
 7. Sejarah Pemikiran
2. Pengembangan Organisasi & Capacity Building
 1. Participatory Planning (antaranya: LFA, ZOPP, PCM, RBM)
 2. General Management
 3. Human Resource Management
 4. Institutional Development
 5. Gender and Development
 6. Community Development
 7. Small Scale Business
 8. Bio-diversity
 9. Sub-district Economic Development Program
 10. Fundraising
3. Conflict Resolution & Peace Building
 1. Mediation and Peace Building
 2. Third Party Neutral (TPN)
 3. Conflict Management
 4. Community Based Conflict Resolution
4. On The Job Training Keuangan

Pelatihan-pelatihan ini ditujukan bagi para aktivis, intelektual muda dan staff pemerintahan dengan usia maksimal 35 tahun; berpengalaman dalam mengelola program pembangunan sedikitnya selama 2 tahun; pendidikan setingkat S1.

Disamping penyelenggaraan secara reguler di Pusat Pelatihan USC-Satunama, pelatihan-pelatihan ini juga dapat diselenggarakan secara khusus atas permintaan dari organisasi atau lembaga tertentu.

Divisi Umum/Program Pendukung

Fungsi

Divisi Umum merupakan instrumen pendukung seluruh program USC-Satunama, baik dari aspek personil (sumber daya manusia), peralatan maupun finansial. Dengan perkembangan program dan organisasi yang cukup pesat sejak tahun 1997, peran Divisi ini cukup menentukan. Saat ini staff USC-Satunama berjumlah 47 orang, 16 relawan dan 32 orang tenaga ahli mitra (associate professional staff). Sejak pertengahan tahun 2000, Divisi ini secara terus-menerus menyesuaikan mekanisme organisasi dan manajemen sumberdaya manusia dengan kebutuhan program.

Fasilitas

Disadari, kelangsungan program juga ditentukan oleh kemampuan pendanaan secara berkelanjutan. Divisi Umum mengupayakan pendanaan program dan operasional organisasi melalui penyediaan pelayanan fasilitas pelatihan. Saat ini USC-Satunama, di bawah pengelolaan Divisi Umum, memiliki gedung pusat pelatihan dengan 2 buah ruang pertemuan dilengkapi fasilitas, seperti OHP, in focus, slide projector, tv & video, white board dan soft board serta pendingin ruangan. Pusat Pelatihan ini memiliki 22 kamar-tidur yang mampu mengakomodasi 48 peserta, lengkap dengan sarana komunikasi (telephone, fax, e-mail).

Pengembangan Sumberdaya Manusia

Divisi ini juga mengkoordinir peningkatan kapasitas staff agar mendukung peningkatan kapasitas lembaga. 15 orang staff telah dikirim untuk mengikuti berbagai jenis pelatihan seperti "Social Enterprises" (TIFA), "Ethic Development of NGO" (LP3ES), "Advocacy Capacity for NGO" (INSIST), "Conflict Mapping di Indonesia: Perdamaian dan Demokrasi" (CSPS dan UGM), "Analisis Sosial" (UI), "Program Linux" dan "Bervert A Course" (UGM), "Fund Raising" (Australia), "Political Education" (Jerman), "Administration Workshop" (Bangkok), "Studi Banding Program dan Keuangan" (Nepal dan Bangladesh), dan "SANFEC Workshop" (Nepal).

Sistem Keuangan Baru

USC-SATUNAMA telah menerapkan sistem keuangan baru dengan menggunakan program ACPPAC yang memungkinkan semua saldo proyek dapat diketahui setiap saat dan laporan keuangan dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Sebagai bentuk berbagi pengalaman sistem keuangan, USC-SATUNAMA telah menyelenggarakan On Job Training Keuangan bagi beberapa lembaga yang berminat.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 6

Pendidikan Publik

Fakta

Sumber informasi tunggal dan seleksi ketat terhadap jenis informasi bagi rakyat, kita tahu berjalan kokoh selama lebih dari 3 dekade. Budaya penyeragaman sangat kuat mewarnai kehidupan bermasyarakat dan bernegara ketika itu. Dan perbedaan diredam dengan cara yang cukup keras. Padahal keberagaman adalah fakta sosial yang tak dapat dihindari. Masyarakat sipil umumnya merindukan kehidupan bermasyarakat yang dinamis dengan kemampuan menegosiasikan perbedaan dalam proses yang demokratis.

Upaya

Memasuki tahun 1999, USC-Satunama mencoba memfasilitasi ketersediaan berbagai jenis informasi yang mungkin dapat membuka wawasan dan kesadaran tentang demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup dan penghargaan terhadap kearifan lokal. Keseluruhan informasi ini dihadirkan kepada masyarakat (public) secara langsung melalui program diskusi interaktif lewat radio, pertunjukan kesenian tradisional (seperti ketoprak, wayang, campursari dan jatilan), pemutaran film, penerbitan buku dan pamflet, pengadaan perpustakaan keliling, pembacaan cerita bagi anak-anak.

Media

Untuk mendukung kegiatan ini, USC-Satunama membangun kerjasama dengan radio swasta lokal, (seperti BIKIMA, RRI Yogyakarta, TVRI Station Yogyakarta,), para seniman, LSM yang bergerak di sektor pertanian, buruh dan perkotaan, lembaga-lembaga pendidikan, dan seluruh aparat di tingkat desa.

1. Radio Gemma Satunama
 1. Pelatihan Radio Komunitas
2. Perpustakaan Keliling untuk Anak-anak
3. Majalah Gemma

Aktor

Seluruh kegiatan ini dilaksanakan secara profesional dengan penuh dedikasi oleh lebih dari 50 relawan (volunteer) yang berasal dari kalangan mahasiswa, LSM dan masyarakat. Secara rutin, para relawan mengunjungi masyarakat di berbagai pelosok kota dan desa dengan membawa serta ratusan judul buku, film dan perlengkapan lain di dalam sebuah mobil yang didesain sebagai perpustakaan dan dekorasi sesuai dengan cita-rasa anak. Para relawan ini kemudian berbaur dengan masyarakat dan menawarkan kegiatan yang dapat mentransformasikan fakta ke dalam kesadaran mereka. Dari pengalaman selama 1 tahun terakhir, pembacaan cerita bagi anak-anak merupakan kegiatan yang sangat digemari, di samping membaca buku yang di sediakan di dalam kendaraan itu.

Pertunjukan kesenian tradisional dan diskusi interaktif sementara ini dilakukan lewat TVRI Station Yogyakarta, radio Bikima dan di pusat pelatihan USC-Satunama. Alat musik dan fasilitas kesenian yang dimiliki oleh USC-Satunama digunakan secara rutin oleh komunitas lokal dan dikelola oleh mereka secara mandiri. Pada tahun 2002, USC merencanakan pembangunan station radio dan memperluas jangkauan perpustakaan keliling serta memproduksi beberapa film dokumenter.

Lampiran 7

Mobilisasi Sumber Daya & Pengembangan Program

Tujuan

Divisi ini merupakan wujud dari keinginan USC-Satunama untuk membagi pengalaman dan pemahamannya kepada organisasi dan lembaga-lembaga pembangunan tentang penguatan dan pengembangan organisasi masyarakat sipil dalam perspektif transformatif.

Kapasitas ini berawal dari pengalaman pendampingan yang telah dilakukan oleh USC-Satunama selama lebih dari dua dasawarsa diikuti dengan proses refleksi analitis terhadap wacana pembangunan yang keseluruhannya didokumentasi serta diekspresikan dalam program

Bidang Pelayanan

Berbagai organisasi lokal dan internasional yang bekerja di Indonesia pernah mendapatkan pelayanan konsultasi dari USC-Satunama, baik untuk organisasinya sendiri maupun untuk lembaga mitra mereka. Bidang atau materi konsultasi yang umum diberikan oleh USC-Satunama meliputi:

Jenis Konsultasi berdasarkan Kategori:

1. Organizational Development
 1. Organizational Assessment
 2. Institutional Development
 3. General Management
 4. Human Resource Management
 5. Participatory Result and Impact Monitoring and Evaluation (PRIME)
 6. Participatory Planning / Strategic Planning (antaranya ZOPP, PCM, RBM, LFA)
 7. Project Survey, Study and Evaluation
 8. Community Based Rehabilitation
2. Program Development
 1. Community Development
 2. Community Program Design and Development
 3. Small Scale Business Development
 4. Cooperative Development
 5. Monitoring & Evaluasi
 6. Penggalangan Dana
3. Development Discourse
 1. Social Analysis
 2. Managing Social Movement
 3. Conflict Resolution
 4. Gender and Development

Bagi USC-Satunama, pelayanan jasa Konsultasi ini sekaligus merupakan upaya penggalangan dana yang memungkinkan keberlanjutan program lembaga.

Lampiran 8

1. Pemberdayaan Rakyat

1. Feb-Mart 2005, Training/Workshop SfGG

2. Pelatihan

1. Juni 2005, Small Scale Business
2. Oktober 2005, Pengembangan Organisasi
3. Desember 2005, Celop (upgrading)
4. Jan/Feb/Maret/Juli/Sep 2005, Celop (Local Politicians)
5. Jan dan Nov 2005, Perencanaan program dan keuangan terpadu
6. Jan-Feb dan Juni 2005, Sejarah Pemikiran/History of Thought
7. November 2005, Cefrul (upgrading)
8. Feb/Maret/Mei/Jul/Sep 2005, Cefrul
9. November 2005, Cefrel (upgrading)
10. Jan/Feb/Mei/Jul/Sep 2005, Cefrel (Religious Leaders)
11. November 2005, Cefil Pendek
12. April dan Agustus 2005, Cefil Panjang

3. Pendidikan Publik

4. Mobilisasi Sumber Daya & Pengembangan Program

1. Mei-Juni 2005, TOT (Training of Trainers)

5. Divisi Umum/Program Pendukung



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pelatihan Kader Lokal

Latar Belakang

Kader lokal (community organizer) adalah relawan yang mengabdikan dirinya untuk memfasilitasi gerakan rakyat dalam melakukan perubahan. USC-Satunama memandang peran kader lokal (community organizer) dalam melakukan perubahan cukup strategis. Karena itu, USC-Satunama secara khusus merancang program pelatihan bagi para kader lokal di wilayah dampingan. Pelatihan ini dilakukan dengan pendekatan pendidikan orang dewasa (adult education), dan berfokus pada aktualisasi kearifan lokal dan peningkatan pemahaman terhadap wacana baru yang relevan.

Tujuan

Ada 6 jenis Pelatihan yang diarahkan pada tujuan ini, yakni: (a) Perencanaan Pembangunan Partisipatif; (b) Management Usaha Kecil dan Kredit Kecil; (c) Pelatihan Keaneka-ragaman hayati dan Pertanian Organik; (d) Kesehatan Mandiri dan Obat Tradisional; (e) Paralegal; (f) Gender.

Pelatihan ini bertujuan menawarkan pemahaman dan keterampilan bagi kader lokal untuk dapat memotivasi komunitas dalam mengolah dan mengembangkan sumberdaya lokal serta mengakses perumusan kebijakan untuk pemenuhan kepentingan rakyat.

Realisasi

Sejak tahun 1998 sampai tahun ini, USC-Satunama menyelenggarakan 2 kali pelatihan setiap tahun untuk masing-masing pelatihan tersebut, dengan jumlah peserta rata-rata 25-50 orang. Pada tahun 2001, untuk mengantisipasi pelaksanaan otonomi daerah, USC Satunama bersama sejumlah LSM secara intensif memfasilitasi forum-rakyat di 4 Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta serta Kabupaten Flores Timur, NTT untuk memahami desain kebijakan otonomi dan merumuskan pemikiran alternatif dari rakyat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pengembangan Usaha Kecil & Sektor Informal

Latar Belakang

Sejak awal dekade 1970, peran usaha kecil dan sektor informal dalam menyerap tenaga kerja diakui sangat tinggi. Bahkan krisis moneter yang melanda bangsa ini tidak juga menggoyahkan keberadaan mereka. Sejak 1995, USC-Satunama secara intensif melakukan pendampingan terhadap para pengusaha kecil dan sektor informal di Propinsi DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Program ini diawali dengan pelatihan Manajemen Usaha Kecil, Perumusan Business Plan serta Manajemen Kredit. Kemampuan para pengusaha dalam mengelola dan merumuskan usahanya memungkinkan mereka mengakses pasar produk mereka dan fasilitas kredit yang disediakan lembaga-lembaga keuangan, maupun bantuan teknis yang disediakan oleh USC-Satunama.

Tujuan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta akses pengusaha kecil untuk dapat mengembangkan sumberdaya ekonomi mereka secara otonom.

Realisasi

Pada tahun 2000 - 2001, di Wilayah DI Yogyakarta USC Satunama telah mendampingi 48 kelompok pengusaha kecil, dengan total anggota mencapai 1.252 orang, serta 3 LSM dengan jumlah dampingan sebanyak 1.189 orang.

Di Flores Timur, NTT, USC-Satunama memfasilitasi terbentuknya dua koperasi rakyat yakni: Koperasi Galekat Lewo dan IKAMALA. Koperasi Galekat Lewo berhasil merangkul 1.500 orang anggota, sementara IKAMALA 124 orang anggota. Kedua koperasi ini, yang sejak awal dirancang untuk membantu pemasaran produk anggotanya, sejak tahun 2000 secara rutin dapat memasarkan produk anggotanya, khususnya jambu mete dan asam, ke luar pulau Solor. Dengan keberadaan kedua Koperasi Rakyat ini, para anggota dapat menghindari eksploitasi pedagang perantara, sehingga margin keuntungan yang mereka peroleh jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Apalagi, keuntungan yang diperoleh Koperasi, setiap tahun dibagikan kembali kepada anggota sebagai deviden.

Kedua koperasi-rakyat ini sejak awal dikelola oleh anggota sendiri dengan bantuan teknis dari staff lapangan USC-Satunama di Larantuka. Memasuki tahun 2001, kedua koperasi ini mulai secara intensif melakukan perannya sebagai pusat informasi dan pusat pelatihan bagi masyarakat Solor.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Cerita Sukses

Ny. Soekirah: Penjual Jamu Gendong

"Dulu hampir semua penduduk desa ini sinis terhadap saya. Mereka punya anggapan, penjual jamu-gendong itu "nakal"," jelas Soekirah memulal kisasnya.

Tetapi kini, Soekirah punya sejumlah usaha yang menurutnya kecil-kecilan. Setiap hari Soekirah membuat jamu, lalu ia juga punya usaha jual-beli barang-barang bekas, disamping sebagai peternak kambing. Dari menjual jamu saja, Soekirah bisa meraih untung Rp. 10.000,- sampai Rp.25.000,- per hari. Sedang dari usaha lain, Soekirah enggan menyebutkan angkanya.

Awalnya Soekirah sebagaimana para Ibu di desa Pak Randu, Gombang, Gunung Kidul bekerja sebagai petani di lahan yang sangat terbatas dan tandus. Tentu hasil dari bertani, tidak cukup untuk menutup kebutuhan kedua anaknya, meski Suroso sang suami berupaya keras meningkatkan penghasilannya sebagai tukang bangunan. Apalagi ketika krisis ekonomi menerpa bangsa ini, pekerjaan Suroso semakin tidak menentu.

Pada tahun 1992, Soekirah lantas berguru kepada seorang penjual jamu di Wonosari, lalu bekerja sambil memperdalam pengetahuannya -- selama beberapa saat kepada penjual jamu lain di Pasar Wonosari. Setelah itu ia memberanikan diri untuk membuat jamu sendiri dengan modal seadanya, lalu menjajakannya di sepanjang jalan utama kota Wonosari. Profesi ini dia jalani selama lebih dari 5 tahun, kemudian dia "mendiversifikasi" usahanya dengan menggeluti jual-beli barang-barang bekas. "Lumayan", kata Soekirah tentang penghasilannya dari usaha barunya ini.

Sejak usaha Soekirah berkembang, satu-dua Ibu tetangganya datang dan berguru kepada Soekirah. Dengan tulus, Soekirah mengajarkan cara membuat jamu dan jalan yang ditempuhnya dalam menjajakan jamu produksinya. Ternyata, para Ibu yang berguru kepadanya juga dapat merasakan besarnya keuntungan yang mereka peroleh. Tak terasa, waktu berjalan begitu cepat, saat ini ada 32 orang Ibu di desa ini yang menjalankan usaha jamu-gendong.

Pada tahun 1999, secara tak sengaja, Soekirah bertemu kerabatnya yang mengenal kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dari USC-Satunama. Lalu Soekirah mengundang staff lapangan USC-Satunama untuk memberikan Pelatihan Manajemen Usaha Kecil kepada kelompoknya, UB. Sumber Waras. Pelatihan itu kemudian diadakan, yang kemudian disusut dengan penyediaan kredit lunak kepada mereka untuk bisa memperbesar usaha sekaligus menambah jumlah anggota.

Kini tak hanya penjual jamu-gendong yang bergabung dalam kelompok ini, ikut juga para pedagang pasar dan pemilik kios.

Cokrosuseno: Petani Organik

"Perjumpaan saya secara tidak sengaja dengan para petani organik, ternyata membuka cakrawala baru bagi saya," kata Cokrosuseno menjelaskan awal pengetahuannya tentang sistem pertanian organik.

Hadir pada Perayaan Hari Pangan Sedunia di Ganjuran pada tahun 1995 merupakan awal perkenalan sekaligus pembuka kesadaran Cokrosuseno tentang makna limbah alami bagi kelangsungan hidup manusia dan lingkungan alamnya. Tadinya, Cokrosuseno adalah salah seorang pelopor pendirian Koperasi Unit Desa (KUD) di Dlingo, Mojosongo, Boyolali. Bahkan selama lebih dari 5 tahun ia bekerja sebagai staff di KUD tersebut. Dan sebagai staff KUD, sudah pasti konsentrasi pikiran dan perhatian Cokrosuseno tertuju pada penyaluran pupuk, pestisida dan bibit yang serba hibrida. Bagaimanapun, semakin besar jumlah pupuk, pestisida dan bibit yang bisa dia salurkan kepada petani, semakin naik reputasinya di lingkungan kerjanya. Tetapi lambat-laun ternyata dia menyadari semakin tahun, semakin pahit dan muramnya kehidupan petani. Biaya produksi semakin tinggi, sementara harga terus merosot.

Dari percakapannya dengan sejumlah petani organik yang memamerkan produknya di Perayaan Hari Pangan Sedunia itu, Cokrosuseno lantas teringat kembali saat pupuk kimia, pestisida dan bibit serba hibrida itu belum hadir di kampungnya, hidup petani tidaklah semuram saat ini. Dan hama tanaman tidaklah sebanyak saat ini. Itulah fakta ketika Eyang dan Buyut masih "sugeng", seingat dia. Namun kembali ke zaman Eyang, tentu tidak mudah. Tanah terlanjur dijauhi oleh cacing, kodok, burung dan hewan lain yang dulu akrab dengan anak petani. Bahkan *genjer* sudah lama tak pernah terlihat lagi.

Maka ketika Cokrosuseno mendengar HPS mengadakan Pelatihan Pertanian Organik di Klaten pada tahun 1996, ia bergegas mendaftarkan diri sebagai peserta. Setelah itu Cokrosuseno aktif mencari tahu dari para petani yang sudah menerapkan sistem pertanian organik, khususnya yang berada dalam jaringan HPS. Merasa cukup memahami secara teknis pertanian organik ini, lalu Cokrosuseno mencoba menerapkannya dilahan sawahnya yang tak seberapa itu.

Tahun pertama sampai kedua, sungguh merupakan tahun yang sangat melelahkan bagi Cokrosuseno. Hasil panennya selalu berada jauh di bawah panen tetangganya yang menggunakan pupuk kimia. Tetapi Cokrosuseno tak juga menyerah, ia teruskan menggunakan pupuk organik, tanpa pestisida dan tetap menggunakan bibit padi lokal yang ia dapatkan dari HPS. Baru pada tahun ketiga, hasil panen Cokrosuseno perlahan-lahan mendekati jumlah panen tetangganya, tapi yang jelas, biaya produksi padi Cokrosuseno jauh di bawah biaya produksi tetangganya. Dia mulai percaya diri.

Kini, dari lahan seluas 2 hektar, rata-rata menghasilkan 7 ton padi. Keberhasilan Cokrosuseno ini menarik perhatian para petani di desanya bahkan desa-desa lain yang berdampingan. Tak kurang dari 50 petani di desa itu yang kini mengikuti jejak Cokrosuseno. Sejak saat itu, Cokrosuseno kian kondang, undangan sebagai nara-sumber dan pembicara pada acara seminarpun bukan hal yang istimewa lagi baginya. Dengan keberhasilan ini juga ia mendapat kesempatan berseminar ke Italy, Taiwan dan Filipina. Pak Cokro!

Lampiran 13

Pengakuan Pak Romadlon tentang dampak Proyek Air Bersih.

Ketersediaan air telah mengubah kehidupan. Sekarang ini, hidup terasa lebih tenang. Air yang menjadi sumber kehidupan tersedia dengan mudah, sehat dan cukup. Ketika mata air di Grembul belum dimanfaatkan, masyarakat di 5 komunitas di desa Banjaroyo memperoleh air dari PAH (Penampungan Air Hujan). Di desa ini musim hujan relatif pendek, hanya berlangsung sekitar 3 bulan, selebihnya musim kemarau. Di musim kemarau itulah biasanya kesulitan air bersih muncul, karena persediaan air hanya cukup untuk 2 bulan, itupun terbatas untuk minum dan masak. Untuk memenuhi kebutuhan air selama 4 bulan kedepannya, masyarakat memanfaatkan sumber air yang ada di masing-masing dusun yang berjarak \pm 700 meter. Itupun harus antri selama berjam-jam untuk mendapatkan 1 piteng/jerigen berisi 25 liter. Kadang-kadang, penduduk membawa pekerjaannya ke mata air. Sambil menunggu giliran dan piteng terisi mereka membuat slondok (makanan dari ketela pohon) atau anyaman.

Dengan adanya jaringan air bersih ini, penduduk merasa lega. Kini masyarakat dapat mengakses air tidak hanya untuk minum melainkan juga untuk mandi, cuci. Limpahan di sumber-air dapat dipakai untuk kegiatan pertanian dan perikanan. Bapak Romadlon, warga dusun Plengan menuturkan: "Air sungguh membantu kami untuk lebih fokus dalam usaha meningkatkan pendapatan. Dulu produktifitas masyarakat rendah, karena banyak waktu dihabiskan untuk menunggu giliran mendapatkan air. Tetapi sekarang, tidak perlu membuang waktu berjam-jam untuk mendapatkan air, beberapa langkah saja sudah tersedia kran air. Saya adalah salah satu warga yang beruntung tinggal di dekat sumber air. Saya dibuatkan bak kecil dan saluran irigasi sederhana sehingga limpahan air dari bak, saya salurkan ke kolam dan limpahan dari kolam saya manfaatkan untuk menanam sayur-sayuran di musim kemarau dan padi di musim hujan. Musim tanam yang lalu, saya panen timun hampir 2 kuintal. Saya jual ke pasar pas harganya tinggi, sebagian saya bagi-bagikan kepada tetangga. Panen ikan juga sangat baik karena airnya mengalir terus, sehingga ikannya sehat dan cepat besar. Dalam empat bulan ikan dapat dipanen. Lumayan, hasilnya dapat saya gunakan untuk tambahan biaya pasang listrik..



Pak Romadlon menuai panen 200 kg timun





Lampiran 14

Mendapatkan Metode Yang Cocok Untuk Memfasilitasi Masyarakat Akar Rumput (Kesaksian M. Ikhsanudin, alumnus CEFIL XII)

Dalam pelatihan CEFIL XII yang lalu, saya mendapatkan tempat pematangan dan kesempatan untuk mensistematisir pengetahuan yang berserak selama ini. Sebelum mengikuti pelatihan CEFIL, saya melakukan aktifitas saya dengan semangat "yang penting terjun ke masyarakat dan memulai gerakan" dengan bekal pengetahuan yang pas-pasan saja. Berkat pelatihan CEFIL, saya bisa mendapatkan pematangan atas segala hal yang pernah saya lakukan di lapangan. Dari proses pelatihan selama sebulan di USC-SATUNAMA, saya mendapatkan banyak masukan informasi dan pengetahuan, terutama dari pak Meth Kusumahadi. Saya banyak belajar dari model-model strategic planning yang ditawarkan oleh beliau. Materi itu menurut saya sangat mempengaruhi kerja-kerja saya walaupun saya tetap harus melakukan modifikasi di lapangan, sesuai dengan konteks lapangan. Yang kedua, saya mendapatkan banyak pengetahuan dan informasi dari materi gerakan sosial yang difasilitasi oleh mas Dadang Yuliantara. Dia mencuci otak kami para peserta, dan membuka wawasan tentang bagaimana seorang aktifis gerakan itu mesti melakukan langkah-langkah strategis untuk perubahan dan konsisten dengan visi bersama yang telah dibangun. Materi ketiga, adalah analisis social (ansos), yang difasilitasi oleh mas Fajar Sudarwo. Kita dikenalkan dengan pelbagai paradigma analisis sosial dan dilatih untuk menerapkannya. Perluasan informasi yang diberikan oleh mas Heru Nugroho dari Center For Critical Social Studies (CCSS) dan mba Dwi Astuti dari Bina Desa cukup memperkaya wacana. Ketiga materi itulah yang menurut saya sangat membantu kerja-kerja saya selama ini pasca cefil.

Berkaitan dengan metode, saya salut dengan pak Wiladi Budiharga yang memfasilitasi hari pertama sampai hari ketiga tentang civil society. Beliau sangat inovatif dengan pelbagai permainan yang mengandung banyak makna dan unsur pemberdayaan. Metode itu sangat cocok ketika saya bertemu dengan masyarakat grass root. Kemarin ketika saya memfasilitasi sebuah komunitas di Solo, saya mencoba mempraktekkan satu permainan yang hampir sama dengan permainan yang pernah dilakukan oleh pak Wiladi ketika pelatihan CEFIL. Ternyata, melalui metode itu, materi yang disampaikan menjadi lebih mudah dipahami oleh mereka daripada melalui metode dialog yang muluk-muluk. Jadi metode itu cocok untuk memfasilitasi masyarakat akar rumput. Yang jelas, saya banyak belajar dari pelatihan CEFIL yang saya ikuti selama satu bulan tersebut, baik dari sisi materi, cara analisis maupun metode.

Saya hanya menyangkan proses *live-in* yang tidak maksimal. Analisis yang kita lakukan setelah *live-in* tidak dilandasi dengan kesungguhan. Selain itu, ada pendamping yang sangat mengatur kita, sehingga kita seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Ada pula pendamping yang tidak partisipatif, akhirnya kita seperti tidak bisa belajar banyak dari *live in*. Oleh karena itu, menurut saya, model *live-in* yang dilakukan perlu diperbaharui.

Namun demikian, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada, saya mengucapkan terima kasih kepada USC-SATUNAMA yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk ikut serta dalam pelatihan CEFIL. Sungguh, materi-materi tersebut telah memberi banyak manfaat kepada diri saya dan lembaga saya. Di pesantren, sekarang ini saya bisa mengaplikasikan beberapa teori yang saya peroleh dalam pelatihan CEFIL walaupun dengan cara bertahap dan dengan berbagai modifikasi. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih pada bapak/ibu dan teman-teman di CEFIL. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada Pak Meth, mas Jarwo, mbak Jolie, mas Dani, mbak Latri, dan banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan.



Peserta pelatihan menikmati dinamika kelompok

Sosialisasi Otonomi Daerah

Latar Belakang

Pola dan strategi pembangunan top-down – instruksi Pusat untuk dilaksanakan Daerah – yang telah berlangsung selama hampir seusia kemerdekaan Indonesia, khususnya dalam 3 dekade terakhir, secara nyata mengakibatkan pemiskinan, ketimpangan, ketidak-adilan sekaligus mematikan inisiatif, dinamika, institusi, kearifan dan budaya lokal. Eforia menyambut datangnya "reformasi" Pemerintah tiba-tiba menghadiahkan "otonomi" bagi Daerah, lewat UU No. 22 dan 25 Tahun 1999. Hadiah ini disambut masyarakat dengan kebingungan dan ketidak-tahuan.

Padahal, pelaksanaan otonomi daerah sekaligus pemberlakuan UU No. 22 dan 25/1999 efektif pada Januari 2001. Karena itu USC-Satunama mencoba memfasilitasi dialog antara rakyat dengan anggota legislatif serta Pemerintah Daerah untuk memahami substansi UU No.22 dan 25/1999 sekaligus menyampaikan persepsi rakyat terhadap isi UU No.22 dan 25/1999 untuk dipertimbangkan di dalam perumusan Peraturan Daerah sebagai aturan pelaksana UU No.22 dan 25/1999.

Realisasi

Untuk memahami sekaligus mampu menyampaikan aspirasi rakyat dalam konsep dan pelaksanaan otonomi daerah, USC-Satunama melakukan beberapa kegiatan sbb.:

- Mengadakan dialog / sarasehan antara masyarakat dengan wakil rakyat tingkat Kabupaten maupun Propinsi di 4 Kabupaten di Propinsi DI Yogyakarta dan Kabupaten Flores Timur, Propinsi NTT.
- Mengadakan Lokakarya untuk merumuskan modul pelatihan Badan Perwakilan Desa (BPD). Kegiatan ini ditindak-lanjuti dengan penyelenggaraan Pelatihan bagi anggota Badan Perwakilan Desa.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 16

VISI

Sebagai organisasi non-profit, non-primordial, dan non-politis, USC-SATUNAMA menegaskan komitmen perjuangannya untuk menghapuskan kemiskinan dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, demokratis, berkeadilan sosial dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).

MISI

USC-SATUNAMA berjuang untuk mengembangkan potensi lokal dan nilai-nilai universal melalui kemitraan antar rakyat pada tingkat lokal, regional, nasional dan internasional dengan cara demokratis dan tanpa kekerasan.

Misi tersebut direalisasikan melalui lima divisi, yakni Divisi Pemberdayaan Rakyat, Divisi Konsultasi, Divisi Pendidikan, Divisi Pembaharuan dan Tata Pemerintahan serta Divisi Umum, dan tiga bagian yakni Bagian Riset dan Pengembangan, Bagian Radio, serta bagian Fundraising.

Masyarakat berhak mendapat informasi seluas-luasnya, termasuk nilai-nilai universal. Untuk memenuhi itu, USC-SATUNAMA memanfaatkan media elektronik yakni siaran radio dan produksi media audio-visual. Radio SATUNAMA mengudara pada gelombang 864 KHz (AM) dengan menyiarkan *features*, iklan layanan masyarakat, dan tips-tips yang berguna bagi keseharian hidup masyarakat. Tema-tema yang diangkat antara lain tentang kesehatan umum, tanaman obat alternatif, perdamaian, pertanian, pekerja rumah tangga, anak jalanan dan pemilu. Produksi audio-visual telah menghasilkan 3 buah VCD filem dokumenter tentang pengorganisasian masyarakat.

Komentar Nurhayati, pendengar

"Wah saya senang mendengarkan siaran radio ini karena lagu-lagunya menarik, apalagi berkat tips kesehatannya saya jadi lebih mengerti informasi tentang penyakit cikungunya"

RISET DAN PENGEMBANGAN

Bagian Riset dan Pengembangan bertujuan untuk mendukung divisi dan program lain dalam menilai kemajuan dan mengembangkan program baru. Seluruh program lembaga dapat dilihat sebagai sebuah *action research*, sehingga organisasi terus-menerus berkembang sesuai kebutuhan zaman. Selain itu, divisi ini berfungsi sebagai "rumah produksi pemikiran" (*think tank*) untuk mengkoordinir manajemen pengetahuan (*knowledge management*) di USC-SATUNAMA. Divisi ini juga berperan untuk mengkoordinir segala macam publikasi lembaga.

Pada awal sejarahnya, USC-SATUNAMA tergantung pada asupan dana dalam rangka kerjasama dengan donatur internasional. Keadaan tersebut bersifat sementara, dan upaya untuk mendapatkan dukungan dana lokal kami usahakan terus-menerus. Bagian *Fundraising* dimaksudkan untuk mengembangkan dukungan lokal serta diversifikasi dukungan, sehingga ketergantungan pada satu institusi, baik lokal, nasional maupun internasional dapat dihindari. Semua dukungan tersebut tidak boleh mengganggu otonomi, kebebasan dan jatidiri lembaga.

Hingga saat ini kami telah bekerjasama dengan USC-Canada, Yayasan Konrad Adenauer, Kedutaan Besar Denmark, dan Tifa Foundation. Donasi mereka telah membuat kapasitas kami berkembang. Dari 50 staff yang ada, 19 dibiayai oleh para donatur, dan sisanya kami biayai dengan kekuatan finansial kami sendiri. Kapasitas internal inilah yang akan terus dipupuk oleh Bagian *Fundraising*.



IMPACT

Drinking Water



USC-SATUNAMA
Menanam Benih Keadilan

USC-SATUNAMA helps communities to construct drinking water systems in poor villages in Indonesia, it knows there will be more than just benefits to health, education and wealth which combined help to empower the village.

This is a brief description of the impact on Ibu Mari, her family and the village following the successful completion of a drinking water system in Lamakukung village on Adonara island, NTT. This is a village with 78 households and a population of about 550.

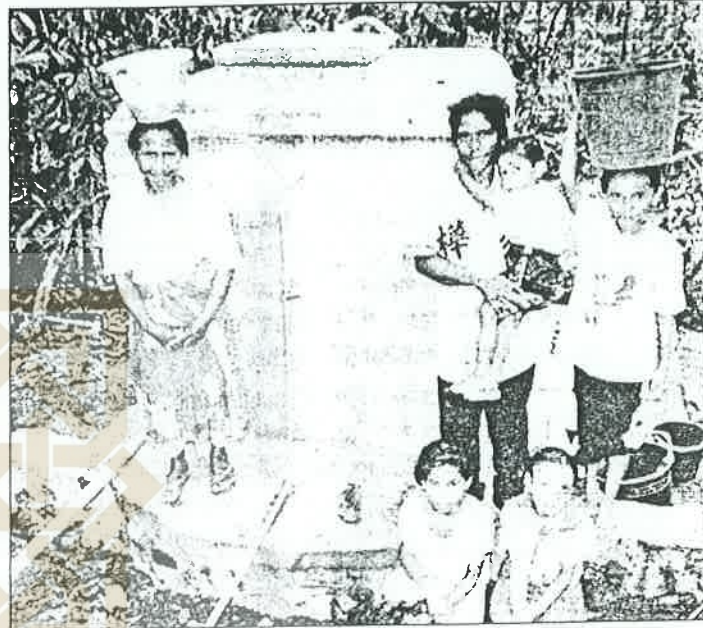
Ibu Mari says it's hard to remember that only a year ago she had to walk 1 kilometre to the spring every morning to fetch water. During that time she (often with her children) would have to wait her turn as other women filled their various containers. Often there were long queues among the women about their place in the queue and this was an overall unpleasant experience.

Before the result of the trip to the spring was barely enough for drinking and cooking food. Two of her 3 children went to school without shoes and in clothes that were not always clean. The youngest child was only newly born and it was a constant struggle to keep the family fed and contented. Her husband worked their farm land but did not have the energy to ensure sufficient harvests. The general health of the family was not good, due also to the fact they had no proper toilet facility which promoted disease.

Now that water is piped to the village and Ibu Mari shares one of the 78 households with 11 other families. Water is still limited in the dry season but the village has a good management system that ensures an equitable sharing arrangement. The availability of water has enabled the family to grow fruit and vegetables at or near the house: year round vegetable production, a toilet/washing facility, reduction in household help and small scale brick production.



Ibu Mari with her brother-in-law, Pak Anton



Public tap for community use

The impact as a result has been:

Improved nutrition – the year round vegetable supply ensures adequate vitamins and minerals can now be supplied in the diet.

Improved health – proper toilet and washing facilities, in combination with improved nutrition, have reduced disease incidence.

Improved educational opportunities – children now have more time and energy to concentrate on their studies.

Improved wealth – a decrease in expenses to buy food from the market and the sale of surplus vegetables and bricks has enabled family members to buy household items and books for schooling as well as personal items.

Improved wellbeing – the combination of the above has improved this family's overall wellbeing and enjoyment of life. The same goes for the other 77 families in the village.

There has also been improved sustainability of the environment and improved administration of village affairs.

Ready access to drinking water provides one of the keys to unlocking the potential within individuals, families and communities.



USC-SATUNAMA
Menanam Benih Keadilan

Jl. Sambisari No. 99 Duwet, Sendangpadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta 55285, Telp. 0274-867745, 867746, 867747, Fax. 0274-869044
Email : training@usc-satunama.org Website : www.usc-satunama.org

RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. DATA PRIBADI

1. Nama: Anton Wijaya
2. NIM: 00540101
3. Fakultas: Ushuluddin
4. Jurusan: Program Studi Sosiologi Agama
5. Tempat dan Tanggal Lahir: Bantul, 21 November 1979
6. Jenis Kelamin: Laki-laki
7. Alamat: Ngampon 01/27, Sitimulyo, Piyungan, Bantul, 55792

B. PENDIDIKAN

1. TK. Aisiah Bustanul Athfal Bodon, Kotagede, Yogyakarta :1985-1986
2. SD. Muhammadiyah Bodon, Kotagede, Yogyakarta :1986-1992
3. SMP Negeri 10 Yogyakarta :1992-1995
4. SMU Negeri 1 Banguntapan Yogyakarta :1995-1998
5. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta :2000-2006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA